

**IMPLEMENTASI PERPRES NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU
PRAKERJA PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH* (Studi di Akun Tiktok
@panduanprakerja)**

SKRIPSI

Oleh:

Salsabilla Alia Rizki

NIM 17220017



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**IMPLEMENTASI PERPRES NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU
PRAKERJA PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH* (Studi di Akun Tiktok
@panduanprakerja)**

SKRIPSI

Diajukan Guna untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana

Hukum (S.H.)

Oleh:

Salsabilla Alia Rizki

NIM 17220017



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Demi kesaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“IMPLEMENTASI PERPRES NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENINGKATAN
KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA PERSPEKTIF
MASHLAHAH MURSALAH (Studi di Akun Tiktok @panduanprakerja)”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan pekerjaan milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini disusun oleh orang lain, menjiplak, menduplikat sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana yang saya peroleh dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Mei 2021

Penulis,



Salsabilla Alia Rizki
NIM 17220017

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Salsabilla Alia Rizki NIM 17220017 Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**“IMPLEMENTASI PERPRES NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU
PRAKERJA PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH* (Studi di Akun Tiktok
@panduanprakerja)”**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan pada Majelis Dewan Penguji

Malang, 24 Mei 2021

Mengetahui,
Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Svariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing



H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum
NIP 198810192019031010



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Salsabilla Alia Rizki
NIM : 17220017
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas / Instansi : Syariah / UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Dosen Pembimbing : H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum
Judul Skripsi : "Implementasi Perpres Nomor 76 Tahun 2020 tentang peningkatan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja perspektif *Mashlahah Mursalah* (Studi di Akun Tiktok @panduanprakerja)"

No	Hari / Tanggal	Materi/Hasil Konsultasi	Paraf
1.	21 Januari 2021	Proposal Skripsi	
2.	22 Januari 2021	Proposal Skripsi	
3.	6 Februari 2021	Proposal Skripsi	
4.	19 Februari 2021	Proposal Skripsi	
5.	26 Februari 2021	Proposal Skripsi	
6.	31 Maret 2021	Judul Skripsi dan Metodologi Penelitian	
7.	5 April 2021	Bab I	
8.	4 Mei 2021	Skripsi Bab I - IV	
9.	24 Mei 2021	Revisi Bab I- IV	

Malang, 1 Oktober 2021

A.n. Dekan

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Svariah

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Salsabilla Alia Rizki, NIM 17220017 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:


**“IMPLEMENTASI PERPRES NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU
PRAKERJA PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH* (Studi di Akun Tiktok
@panduanprakerja)”**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dosen Penguji:

1. Iffaty Nasyiah, M.H.
NIP 19606082009012007
2. Ali Hamdan, P.hD
NIP 197601012011011004
3. H. Faishal Agil Al-Munawar, Lc., M.Hum
NIP 198810192019031010

()
Ketua

()
Penguji Utama

()
Sekretaris

Malang, 13 Oktober 2021

Dekan,

()
Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pengerjaan skripsi yang berjudul “Implementasi Perpres Nomor 76 Tahun 2020 tentang Peningkatan Potensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja Perspektif *Mashlahah mursalah* (Studi di Akun Tiktok @panduanprakerja)” dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada nabi kita, junjungan kita nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang-benderan ini, yakni agama Islam. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umat nabi Muhammad yang nantinya akan mendapatkan syafaat Nabi di hari akhir. Aamiin.

Dengan segala bimbingan dan arahan, serta layanan yang telah diberikan, semangat dari berbagai pihak maka dengan segala kerendahan hati penulis izinkan untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Karyawan dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Orang tua dan keluarga yang tiada hentinya membantu dalam doa, semangat, tenaga dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar teman-teman angkatan 2017 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Segenap member Bangtan Seonyeondan yang telah memberikan banyak hiburan sehingga membantu mengurangi kejenuhan selama pengerjaan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi adalah pedoman yang digunakan peralihan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Adapun penulisan ini di berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan Tunggal

ا = Tidak dilambangkan	ط = th
ب = B	ظ = dh
ت = T	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ث = Ta	غ = gh
ج = J	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y
ض = dl	

Adapun hamzah (ء) jika letaknya berada di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya sehingga tidak dilambangkan karena hamzah ini sering dilambangkan dengan alif, namun jika hamzah berada di akhir atau tengah kata, maka tanda koma diatas (‘) sebagai tandanya.

B. Vokal

Vokal yang ada pada bahasa Arab seperti vokal pada bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	Ai	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya huruf fan tanda, yaitu:

Fathah + Alif, ditulis	Contoh سَالَ ditulis S
َ <i>fathah</i> + <i>Alif</i> maksur ditulis a	Contoh يَسْعَى ditulis <i>Yas 'a</i>
ِ <i>Kasrah</i> + <i>Ya'</i> mati ditulis i	Contoh مَجِيدٌ ditulis <i>Majid</i>
<i>Dhammah</i> + <i>Wau</i> mati ditulis u	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaqulu</i>

D. Ta Marbuthah (ة)

Untuk *ta' marbuthah* terdapat dua macam pada *transliterasi*, yakni *ta marbuthah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t], misalnya نعمة الله yang mana *ta'* disini dibaca t sehingga *ni'matillah*. Sedangkan *ta marbuthah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliteranya dalah [h] misalnya المصلحة sehingga menjadi *al-mashlahah*.

E. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonan ganda karena syaddah ditulis rangkap :

تَبَّتْ	Ditulis <i>tabbat</i>
---------	-----------------------

F. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf qamariyah atau syamsiah dalam transliterasi huruf *alif lam ma'rifah* tetap ditulis al-

الرحمن	Ditulis <i>al-rahman</i>
الحمد لله	Ditulis <i>al-hamdulillah</i>

G. Hamzah

Hamzah hanya berlaku bagi hamzah yang letaknya berada di tengah dan akhir dari suatu kata, namun dalam transliterasi hamzah adalah apostrof. Dalam tulisan arab, hamzah ini berupa alif sehingga apabila terletak di awal kata hamzah tidak dilambangkan.

Contoh :

أَرَأَيْتَ = *aro'aita*

إِتَّبِعُوا = *ittabi'u*

سَيِّئٌ = *syai'un*

إِهْبِثُوا = *ihbithu*

H. Huruf Besar

Dalam bahasa Indonesia, terdapat kata, istilah atau kalimat Arab yang dibakukan ke dalam bahasa Indonesia, kalimat yang sudah sering di tulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi. Seperti *Al-Qur'an*. Namun jika kata ini berada dalam satu kalimat rangkaian bahasa Arab, maka harus ditransliterasikan seperti cara diatas.

Contoh :

السنة قبل التدوين = *Al- Sunnah qabl al-tadwin*

I. Lafadz *Al-Jalalah*

Lafadz Allah yang dalam tulisan Arab terdapat alif, ditransliterasikan tanpa huruf hamzah di depannya.

من الله	Ditulis minallah
---------	------------------

J. Huruf Kapital

Walaupun dalam tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut terdapat ketentuan untuk penggunaan huruf kapital yang di dasari oleh EYD.

Contoh :

وما محمد إلا رسول = wa ma Muhammadun illa Rasul

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnasi

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II.....	18
KAJIAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Implementasi	25
C. Pengembangan Sumber Daya Manusia	25
1. Pengertian Sumber Daya Manusia.....	25
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	26
3. Pelatihan Sumber Daya Manusia.....	26
D. Sistem Informasi Ketenagakerjaan	27
E. <i>Mashlahah mursalah</i>	28
1. Pengertian <i>Mashlahah mursalah</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Mashlahah</i>	32
3. Objek <i>Mashlahah mursalah</i>	33
4. Jenis-jenis <i>Mashlahah</i>	33
5. Syarat <i>Mashlahah mursalah</i>	37

6. Kehujjahan <i>mashlahah mursalah</i>	37
F. <i>Mashlahah mursalah</i> menurut Al-Ghazali	38
BAB III.....	43
METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Metode Pengolahan Data.....	46
BAB IV	48
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Kartu Prakerja	48
B. Analisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 di masyarakat 51	
C. Analisis Pembagian dan Pelatihan Kartu Prakerja Perspektif <i>Mashlahah mursalah</i>	73
BAB IV	90
PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	101

ABSTRAK

Rizki, Salsabilla Alia, 17220017, 2021. “**Implementasi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja Perspektif *Mashlahah mursalah* (Studi di Akun Tiktok @panduanprakerja)**”. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing H. Faishal Agil Al-Munawar, Lc., M.Hum.

Kata Kunci : Pelatihan Kartu Prakerja, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020, *Mashlahah mursalah*

Sebanyak 2,56 juta orang menjadi pengangguran karena dampak COVID-19 dan muncullah program Kartu Prakerja yang diharapkan dapat mengurangi pengangguran di Indonesia yang menimbulkan pro dan kontra pada lapisan masyarakat. Bermula dari fenomena ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap ketepatan pelaksanaan Kartu Prakerja.

Permasalahan dalam Kartu Prakerja ini berkaitan dengan penerimaan peserta Kartu Prakerja yang tidak sesuai dengan instrumen yang berlaku dalam pelaksanaan program ini dan dengan adanya permasalahan ini peneliti memfokuskan pada masalah : 1. Bagaimana implementasi Perpres Nomor 76 Tahun 2020 tentang peningkatan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja di masyarakat, 2. Bagaimana pelaksanaan Kartu Prakerja di SISNAKER di tinjau dari *mashlahah mursalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dari hasil wawancara dengan pendaftar, penerima Kartu Prakerja, Kemnaker dan dari rujukan atau literatur yang digunakan.

Hasil dari penelitian ini mendapatkan dua kesimpulan, yang pertama bahwa pelaksanaan pelatihan Kartu Prakerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 ditinjau dari pelaksanaan dan cita-cita program hanya saja perlu dilakukan perbaikan sistem pendaftaran untuk lebih menepatkan sasaran penerima program. Kedua, sebagian besar pelaksanaan Kartu Prakerja sesuai dengan persyaratan *mashlahah mursalah* dari Imam Al-Ghazali, hanya saja karena program Kartu Prakerja masih harus berubah mengikuti situasi pada saat ini maka belum bisa bersifat qath'i.

ABSTRACT

Rizki, Salsabilla Alia, 17220017, 2021. **“Implementation of Presidential Regulation Number 76 of 2020 concerning Improving Working Competence through the Mashlahah Mursalah Perspective Pre-Employment Card Program (Study on Tiktok Account @panduanprakerja)”**. Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: H. Faishal Agil Al-Munawar, Lc., M.Hum

Keywords: Pre-Employment Card Training, Presidential Regulation Number 76 of 2020, *Mashlahah mursalah*

As many as 2.56 million people have become unemployed due to the impact of COVID-19. Since the pandemic, a Pre-employment card program has emerged to reduce unemployment in Indonesia which creates pros and cons in the society. Starting from this phenomenon, the researcher is interested in conducting research on the accuracy of the implementation of the Pre-Employment Card.

The problem in the case of the Pre-Employment card is related to the acceptance of Pre-Employment Card participants who are not in accordance with the applicable instruments in the implementation of this program and with this problem the researcher focuses on the following problems: 1. How is the implementation of Presidential Regulation Number 76 of 2020 on improving work competence through the pre-employment card program in the community, 2. How is the implementation of the Pre-Employment Card in SISNAKER in terms of *mashlahah mursalah*.

This research is empirical legal research, and uses descriptive qualitative analysis techniques, from interviews with applicants, recipients of Pre-Employment Cards, Ministry of Manpower and from literature used.

The results of this study obtained two conclusions. The first is the implementation of the Pre-Employment Card training is in accordance with Presidential Regulation Number 76 of 2020 in terms of the implementation and goals of the program, only that the registration system needs to be improved to better target the program recipients. Second, most of the implementation of the Pre-Employment Card is in accordance with the requirements of *mashlahah mursalah* from Imam Al-Ghazali, it's just that because the Pre-Employment Card program still has to change following the current situation, it cannot be characterized as *qath'i*.

مخلص البحث

سلسبيلا عاليا رزقي، 1722017، 2021. "تطبيق تنظيم رئيس الجمهورية، رقم 76 لسنة 2020 حول تحسين كفاءة العمل عبر برنامج بطاقة قبل ما التوظيف على أساس المصلحة المرسلة (الدراسة على حساب تيك توك @panduanprakerja)". رسالة جامعية، برنامج دراسة القانون الاقتصادي للشريعة الإسلامية، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف يعني الحاج فيصل عقيل المنور الماجستير.

الكلمات الأساسية: تدريب بطاقة ما قبل التوظيف، تنظيم رئيس الجمهورية، رقم 76 لسنة 2020، المصلحة المرسلة

أصبح المجتمع حول 2,5 مليوناً بطالة بسبب تأثير فيروس كورونا-19 ثم ظهرت برنامج بطاقة ما قبل التوظيف التي تُرْجى لتتقيد البطالة في إندونيسيا، ولذلك ، لها إيجابيات وسلبيات في المجتمع. اهتم الباحث بتلك القضية ويريد أن يبحث دقة تنفيذ بطاقة ما قبل التوظيف.

المشكلة ببساطة ما قبل التوظيف تتعلق بقبول المشاركين الذين لم يناسبوا بتنظيم أداء هذا البرنامج. يركز الباحث بهذا البحث على المشكلتين، يعني: (1) كيفية تطبيق تنظيم رئيس الجمهورية، رقم 76 لسنة 2020 حول تحسين كفاءة العمل عبر برنامج بطاقة قبل ما التوظيف في المجتمع: (2) كيفية تنفيذ بطاقة ما قبل التوظيف في SISNAKER من حيث المصلحة المرسلة.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي واستخدام تقنيات التحليل الوصفي النوعي من نتائج المقابلات مع المتقدمين ، الحاصلين على بطاقات ما قبل التوظيف و Kemnaker ومن المراجع المستخدمة.

وتوجد نتيجتان في هذا البحث، يعني: (1) تنفيذ تدريب بطاقة ما قبل التوظيف موافقة بتنظيم رئيس الجمهورية، رقم t

لسنة 2020 من حيث التنفيذ وأهداف البرنامج ومع ذلك ، من الضروري تحسين نظام التسجيل لتحديد المستفيدين المستهدفين من البرنامج بشكل أفضل: (2) تطبيق بطاقة ما قبل التوظيف موافقة

بشروط المصلحة المرسلة عند الإمام الغزالي ولكن البرنامج لم يكن أن يكون مؤكداً لأنه لم يزل تغييراً مع
الوضع الحالي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dikatakan makhluk yang membutuhkan orang lain dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan dan inilah yang disebut dengan makhluk sosial. Ada beberapa aspek yang harus dicakup dalam kehidupan manusia sebagai bentuk ibadah yakni aspek ekonomi, sosial, politik dan pendidikan, yang mana sebagai hamba Allah, harus merealisasikan misi setiap aspeknya.¹ Aktivitas harian manusia merupakan ibadah ketika dilaksanakan sesuai dengan perintah agama secara konkrit sebagai penjabaran perintah agama. Maka hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT.:²

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

¹ Misbahul Munir, A. Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani Doktrin Reformasi Ekonomi dalam Al-Qur'an* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014), 8.

² Misbahul Munir dan A. Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani Doktrin Reformasi Ekonomi dalam Al-Qur'an*, 9.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, manusia diwajibkan untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka harus melakukan usaha yang disebut dengan bekerja, dan mereka bekerja untuk hidup pribadi atau untuk orang lain yang menggunakan akal ataupun kekuatan anggota tubuh. Islam sangat mengapresiasi dalam bekerja atau amal karena itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia untuk dikerjakan sesuai dengan kemampuannya.

Adanya pandemi COVID-19 yang merupakan wabah yang menyerang seluruh dunia secara cepat, sehingga peringatan agar penduduk dunia melakukan kebijakan yang cepat untuk mengatasi penyebaran COVID-19 yang dinyatakan oleh WHO atau badan kesehatan dunia.³ Kebijakan pemerintah di setiap negara kurang lebih memiliki kesamaan yakni *lockdown*. Hal ini juga dilakukan di Indonesia, yang dampaknya tidak hanya pada pengurangan penduduk Indonesia yang terkena COVID-19, melainkan menjalar ke sektor-sektor fundamental yang ada di Indonesia yang termasuk di dalamnya sektor perekonomian yang ikut menurun.⁴

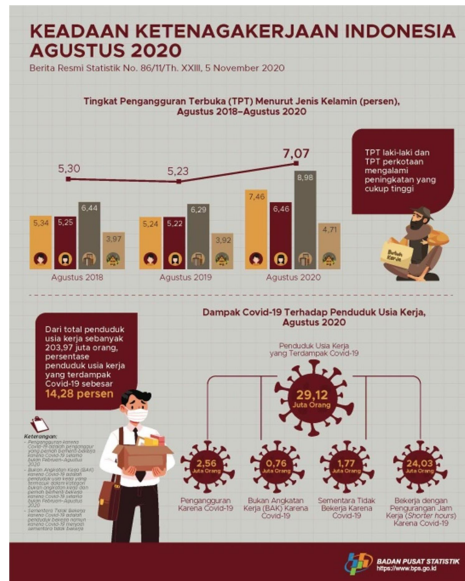
Banyak perusahaan kecil hingga menengah yang harus gulung tikar akibat turunnya jumlah pemasukan di perusahaan mereka karena terdapat

³ Tomi Predianto, Khoirurrosyidin, "Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19," *Gorontalo*, no. 2(2020): 116 [10.32662/gjgops.v3i2.1175](https://doi.org/10.32662/gjgops.v3i2.1175)

⁴ Yoshua Consuello, "Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid-19", *Adalah* no. 1 (2020): 94 <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15479>

penurunan daya beli dari masyarakat. Bahkan mall yang setiap harinya dikunjungi oleh banyak orang, juga harus turut menutup sebagian cabangnya karena pemasukan yang tidak memadai dengan beban pengeluaran mereka. Sehingga, banyak pegawai-pegawai yang harus menerima putusan hubungan kerja akibat hal tersebut dan menimbulkan peningkatan angka pengangguran di Indonesia. Bahkan, transportasi yang setiap harinya merupakan kebutuhan harian juga turut berkurang karena adanya pembatasan interaksi antar orang diluar rumah, seperti pada angkutan umum, ojek *offline* dan *online*, bus, taxi, terlebih pesawat yang menyebabkan harga tiketnya turun hingga 50%. Berdasarkan berita resmi statistik No. 86/11/Th.XXIII, 5 November 2020 data terkait dengan dampak covid-19 terhadap ketenagakerjaan yakni, 29,12 juta orang dengan usia kerja terkena imbas covid-19 yang presentasinya sebesar 14,28%, peningkatan pengangguran per agustus 2020 menjadi 7,07% yang mana 2,56 juta orang menjadi pengangguran karena dampak dari Covid-19, yang dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 1.1 Badan Pusat Statistik



Tingkat pengangguran yang tinggi, harus bisa di atasi oleh pemerintah, yang diharuskan pengikutsertaan peran dari sektor pendidikan dalam mengatasi pengangguran. Karena, pengangguran disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang kompeten di negara Indonesia ini. Sifat malas yang dimiliki oleh masyarakat juga menjadi faktor jumlah pengangguran di Indonesia, banyaknya karyawan yang menerima pemutusan hubungan kerja, *fresh graduate* yang tidak langsung mendapatkan pekerjaan setelah lulus juga ikut menyumbangkan angka pengangguran di Indonesia, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya informasi dalam lowongan pekerjaan, kurang meratanya pekerjaan dan juga kurang adanya pendidikan dalam meningkatkan *skill* untuk setiap masyarakat dari pemerintah.⁵ Sehingga, pemerintah juga berkewajiban untuk bisa menangani terkait dengan pengangguran di Republik Indonesia,

⁵ Riska Franita, "Analisis Pengangguran di Indonesia," *Nusantara*, no. 1(2016): 90 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/97/97>

terutama bagi masyarakat Indonesia yang tidak terdapat keahlian di dirinya secara pasti terhadap suatu bidang tertentu. Karena, sangat sulit untuk bisa mengetahui peningkatan kualitas sumber daya manusia secara langsung dan cara yang sesuai untuk mengetahui peningkatannya melalui pendidikan dan pelatihan yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.⁶

Adanya tindakan inisiatif dari Presiden Joko Widodo terkait hal ini yang mana ia memberikan kebijakan dan program berupa pelatihan Kartu Prakerja, program pelatihan ini merupakan bentuk wujud dan gagasan nyata sebuah kebijakan yang telah dirancang dan dipikirkan matang-matang di jauh hari untuk bias benar-benar dipublikasikan dan diaplikasikan ke masyarakat di Indonesia. Adanya program kartu prakerja yang dapat diakses di beberapa platform ini merupakan program pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan melalui peningkatan kompetensi kerja bagi pekerja, pengembangan jiwa kewirausahaan untuk masyarakat yang ingin membuka usaha atau pemilik usaha mikro dan kecil juga peningkatan kompetensi untuk masyarakat yang masih akan masuk ke dunia kerja.

Program pelatihan Kartu Prakerja adalah salah satu dari program yang dirancang oleh pemerintah untuk bisa mengembangkan sektor perekonomian di Indonesia, yang ditujukan untuk masyarakat yang mencari pekerjaan,

⁶ Priyono Tjiptoherijanto, *Untaian Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1989), 2.

buruh, karyawan, pegawai yang kehilangan pekerjaannya atau bagi mereka yang ingin meningkatkan kemampuannya dalam bekerja termasuk bagi para pemilik usaha UMKM yang ingin mengembangkan usahanya yang dapat diakses pada website <http://www.prakerja.go.id>. Percepatan pelaksanaan program ini merupakan putusan dari Presiden yang mana pelaksanaannya memang lebih cepat dari awal rencana. Akibat adanya pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh pandemi corona yang tersebar wabahnya di seluruh wilayah Indonesia menjadikan kartu prakerja ini sesegera mungkin dilaksanakan. Program ini merupakan program kolaborasi antara pemerintah dengan pihak sektor swasta untuk bisa mendapatkan SDM unggul dengan semangat gotong royong.⁷

Bantuan ini hanya diperuntukkan bagi warga Indonesia yang berumur paling tidak memiliki usia 18 tahun dan tidak sedang sekolah.⁸ Masyarakat yang mendaftar kemudian lolos untuk mengikuti pelatihan Kartu Prakerja ini akan mendapatkan kartu prakerja secara digital dan masing-masing akan menerima uang dengan total Rp 3.550.000 selama dan setelah menjalani pelatihan.⁹

⁷ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, diakses 15 November 2020 <https://www.prakerja.go.id/tentangkami>

⁸ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, diakses 20 Januari 2021, <https://pelatihan.kemnaker.go.id/prakerja/about?acceptPreWorkCard=1>

⁹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, diakses 15 November 2020 <https://www.prakerja.go.id/tentang-kami>

Pemerintah telah meluncurkan program Kartu Prakerja 2020 nasional yaitu pada bulan April yang diharapkan mampu untuk membantu tenaga kerja di Indonesia dan juga bisa mendorong masyarakat untuk bisa meningkatkan level diri mereka sendiri dengan meningkatkan kemampuan yang sudah ada di dalam diri masyarakat. Didasari dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Ketidaktepatan sasaran pada program ini, membuat Peraturan Presiden Nomor 36 di revisi dan dirubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 yang diharapkan program ini memang tepat sasarannya dan juga gunanya.¹⁰

Adapun tujuan asal dari program ini adalah untuk memberikan insentif kepada pengangguran di Indonesia yang cukup menuai kontroversi pada saat itu. Adanya program ini sudah dirancang pada jauh-jauh hari pra pilpres yang mana pada saat pilpres pada April 2019, program Kartu Prakerja ini masuk ke dalam janji dari kampanye pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin.¹¹ Pelatihan ini juga awal mulanya dipublikasikan dengan penerimaan insentif sebesar Rp 300.000,00 – Rp 500.000,00 per bulannya selama tiga bulan dan banyak yang

¹⁰ Zakiatul Zahara, "Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Program Kartu Prakerja", Academia.edu, 2020, diakses 1 April 2021, https://www.academia.edu/44091462/ANALISIS_KEBIJAKAN_PEMERINTAH_TERKAIT_PROG_RAM_KARTU_PRAKERJA

¹¹ Hendra Kusuma, "Awal Mulai Ide Pengangguran 'Digaj' Rp 500 Ribu/Bulan," *detikFinance*, 25 September 2019, diakses 21 April 2021, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4721306/awal-mula-ide-pengangguran-digaji-rp-500-ribubulan>

mempertanyakan darimana asal uang tersebut di dapatkan. Namun, sekarang sudah enam belas gelombang program Kartu Prakerja dilaksanakan dengan banyak perbaikan-perbaikan agar program ini benar-benar tertuju dan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020.

Pada pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden 76 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja berbunyi :

“Selain kepada Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kartu Prakerja dapat diberikan kepada: a. Pekerja/Buruh yang terkena PHK; dan b. pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.”

Pada pasal ini pelatihan Kartu Prakerja hanya tidak diperuntukkan bagi pejabat negara dan jajarannya, bagi mereka masyarakat mampu masih tetap bisa mengikuti program ini dan diperuntukkan bagi pekerja yang terkena PHK, pencari kerja juga pelaku usaha dan prioritas penerima program ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (6) Permenko Perekonomian Nomor 11 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020

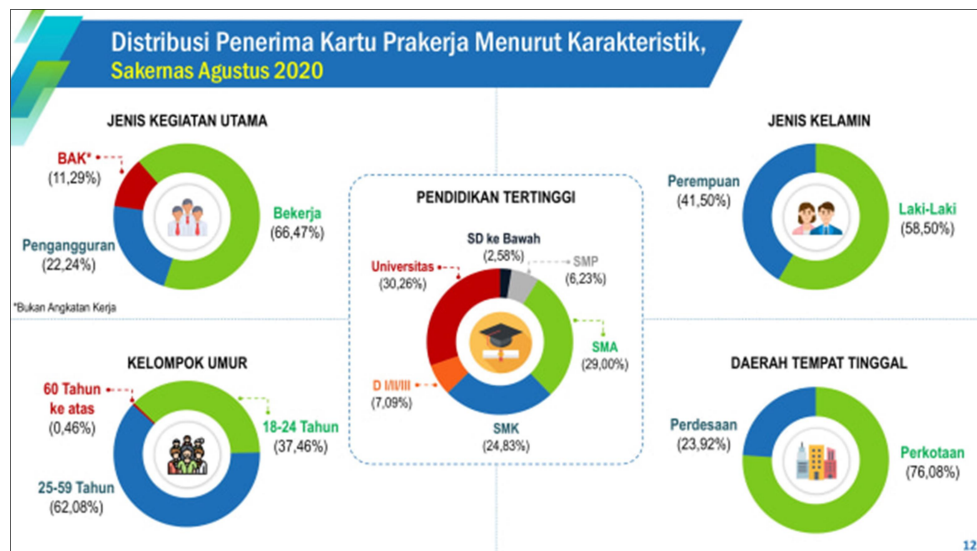
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja yang berbunyi :

“Pemberian Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan kepada calon penerima Kartu Prakerja yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan sosial selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).”

Pasal ini menyebutkan sasaran utamanya merupakan orang-orang yang ter-PHK atau mereka yang terdampak virus corona dan belum menerima bantuan apapun. Memang jika kita lihat pemerintah telah berusaha agar program ini efektif dan dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Namun, dalam prakteknya di kehidupan nyata masyarakat Indonesia yang masih menganggur dan tidak memiliki *skill* terutama bagi mereka yang tidak berada di Pulau Jawa yang kemungkinan akan tergeserkan dengan masyarakat yang lebih berkompeten dan berkecukupan karena tidak lolos di beberapa tes yang diselenggarakan sebelum bisa mendapatkan kartu prakerja. Hal ini terbukti pada diskusi online yang diselenggarakan pada November 2020 yang memberikan bukti dari survey BPS bahwa 66,47% penerima manfaat program kartu prakerja adalah mereka yang sudah bekerja, sedangkan yang benar-

benar pengangguran hanya berada pada presentase 22,24% saja dan ternyata ada juga posisi bagi mereka yang bukan merupakan angkatan kerja sebesar 11,29% yang dapat dilihat pada diagram berikut.¹²

Gambar 1.2 Sakernas



Sangat disayangkan, masyarakat Indonesia yang masih belum mendapat pekerjaan atau bahkan kehilangan pekerjaan karena dampak COVID-19 masih kurang dari 50% yang bisa mendapatkan manfaat dari program ini, terlebih terdapat mereka yang jelas bukan angkatan kerja bisa mengikuti program ini, merupakan suatu hal yang kurang bisa diterima karena tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja yang tertuang dalam pasal 2 huruf (a). Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan

¹² Anonim, "Survei BPS: Mayoritas Penerima Kartu Prakerja Laki-laki Berusia Muda yang Tinggal di Perkotaan," *Tribunnews.com*, 23 November 2020, diakses 21 April 2021, <https://m.tribunnews.com/nasional/2020/11/23/survei-bps-mayoritas-penerima-kartu-prakerja-laki-laki-berusia-muda-yang-tinggal-di-perkotaan>

sosial dan memunculkan adanya persoalan baru yang harus mendapatkan perhatian khusus.¹³ Tidak hanya dilihat dari data BPS, adapun salah satu masyarakat yang ikut mendaftar kartu pekerja dengan kondisi perekonomian yang menurun, masih belum bisa mengikuti program ini dengan alasan “belum lolos” tanpa ada keterangan lebih lanjut mengenai penyebab ketidaklolosannya.

Namun, dibalik sisi negatif dari program ini, pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh pemerintah, dengan harga yang terjangkau juga penjelasan yang baik, membuat program ini juga menjadi program yang paling diminati oleh masyarakat. Ditambah dengan adanya uang insentif yang diberikan dengan besaran yang cukup untuk bisa menambah modal usaha atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menjadikan program ini diperebutkan oleh banyak warga.

Adanya program Kartu Prakerja ini merupakan bentuk perlindungan pemerintah untuk rakyatnya. Begitu juga tujuan syara’ untuk menetapkan suatu hukum ada lima hal, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, menurut pengertian mashlahah oleh Al-Ghazali.¹⁴

Mendapatkan biaya insentif cukup membantu dalam keuangan bagi masyarakat yang mengikutinya, namun juga menimbulkan suatu problem

¹³ Tomi Predianto, Khoirurrosyidin, “Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19,” 120.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), 368

bahwa tidak terdapat jaminan mendapatkan pekerjaan baru bagi penerima pelatihan kartu prakerja yang sudah mengikuti pelatihan tersebut.¹⁵ Sehingga, pembuatan program ini memang ditujukan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia terutama bagi mereka yang terdampak COVID-19. Nabi Muhammad saw bersabda yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَرَ

“Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat mudharat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mudharat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)”¹⁶

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Nabi memerintahkan untuk tidak membuat kemudharatan bagi orang lain dan juga bagi dirinya sendiri, yang hal ini bisa terjadi pada program kartu prakerja ini, karena dalam proses pendaftaran program pelatihan Kartu Prakerja, masih ada persyaratan yang cukup rumit sehingga tidak memudahkan seseorang untuk bisa mendapatkan bantuan ini dari pemerintah.

¹⁵ Imam Royani Hamzah, Siti Khusnia, “Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Sostech*, no. 1(2021): 2
<http://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/3/5>

¹⁶ Yasid bin Abdul Qadir Jawas, “Tidak boleh membahayakan orang lain,” *al-manhaj*, 13 Oktober 2019, diakses pada 31 Juli 2021, <https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html>.

Dalam transaksi pada program Kartu Prakerja ini, terdapat biaya pelatihan senilai Rp 1.000.000 yang tidak bisa diambil secara tunai baik keseluruhan maupun sisa dari uang pelatihan. Begitu juga, pencairan uang insentif yang terdapat persyaratan agar uang insentif tersebut dapat dicairkan dan digunakan oleh penerima Kartu Prakerja dan jika ditelaah lebih lanjut jika dikaitkan dengan situasi masyarakat Indonesia saat ini, anggaran Kartu Prakerja apakah mencukupi untuk seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan program ini?

Sehingga, penulis mengkaji terkait program Kartu Prakerja ditinjau dari *mashlahah mursalah* dengan melihat sisi positif maupun negatif yang terdapat dalam Kartu Prakerja ini dan berdasarkan dari permasalahan di atas maka penulis akan meninjau dan memperdalam permasalahan ini lebih dalam melalui penelitian dengan permasalahan yang berjudul **“Implementasi Perpres Nomor 76 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja Perspektif *Mashlahah mursalah* (Studi di Akun Tiktok @panduanprakerja)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Perpres Nomor 76 Tahun 2020 tentang peningkatan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja di masyarakat?

2. Bagaimana pelaksanaan Kartu Prakerja ditinjau dari *mashlahah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk implementasi Perpres Nomor 76 Tahun 2020 tentang peningkatan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja di masyarakat.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Kartu Prakerja ditinjau dari *mashlahah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik pada aspek teoritis maupun praktis :

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi pemahaman bagi masyarakat terkait sistem pembagian dan pelatihan berbasis Kartu Prakerja dengan tinjauan hukum Islam, dan tidak hanya itu diharapkan penelitian ini juga bermanfaat sebagai pertimbangan dalam segi perekonomian di era modern selaku mahasiswa pada bidang ekonomi Islam.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bacaan dan dapat memperluas pengetahuan tentang pelatihan Kartu Prakerja atau program pemerintah lainnya selanjutnya dan juga sebagai masyarakat yang hendak menggunakan program pelatihan ini untuk lebih bijak dalam menyikapi sistem dari pelatihan kartu prakerja.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional diberikan untuk memberikan batasan pembahasan pada penelitian ini yang menjelaskan variabel dari suatu judul untuk menyamakan persepsi dan tidak terjadi kesalahpahaman. Berikut beberapa definisi yang penulis berikan :

1. Implementasi merupakan tindakan dari pihak yang memiliki kewenangan atau pejabat untuk mewujudkan tujuan suatu program yang telah ditetapkan.¹⁷ Implementasi yang dimaksud pada penelitian ini merupakan pelaksanaan program kartu prakerja yang digunakan untuk mengurangi angka pengangguran, peningkatan sumber daya manusia.
2. Pembagian merupakan pemberian uang insentif dari pelatihan kartu prakerja kepada penerima pelatihan secara merata setelah mengikuti pelatihan.
3. Pelatihan Kartu Prakerja merupakan suatu program pemerintah untuk mengembangkan kemampuan dalam bekerja dan kewirausahaan yang diberikan untuk pencari kerja, juga untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, pekerja yang ingin meningkatkan kualitas kerjanya juga untuk pelaku usaha mikro dan kecil.
4. Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER) merupakan platform digital berbagai jenis layanan publik baik yang di daerah-daerah maupun di pusat.

¹⁷ Raden Deni Atmiral, "Implementasi Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 terhadap Proses Verifikasi Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan" (Thesis, Universitas Medan Area, 2013), <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/568?mode=full>

5. *Mashlahah mursalah* adalah segala yang tidak terdapat bukti dari syara' dalam nash yang tidak membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan penelitian ini penulis membagi menjadi lima bab berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab yang mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan permasalahan yang menjadi dasar-dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang diperuntukkan sebagai perumusan persoalan yang menjadi poin pada pembahasan, kemudian terdapat tujuan dan manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis dan sistematika pembahasan penelitian yang menunjukkan manfaat yang dihasilkan oleh penelitian ini. Dilanjutkan dengan penelitian terdahulu sebagai acuan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri atas terdapat tinjauan pustaka yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti yakni implementasi, pengembangan sumber daya manusia, *mashlahah mursalah*.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjabarkan tentang metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan sistematika penulisan.

Bab IV Paparan dan Analisis Data

Bab berisikan hasil penelitian atau inti dari penelitian yang di dalamnya terdapat penjabaran jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu terkait efektivitas program kartu prakerja dan pelaksanaan kartu prakerja menurut *mashlahah mursalah*.

Bab V Penutupan

Bab terakhir pada penelitian yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran agar penelitian dapat memberikan suatu manfaat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan aspek penting untuk menyusun suatu karya ilmiah untuk mencegah tindakan penjiplakan atau duplikasi. Hal ini diperuntukkan agar tidak terdapat pengulangan dalam penelitian sebelumnya dan menghasilkan hasil penelitian yang komprehensif serta menjaga keorisinilan suatu karya ilmiah dengan dapat membedakan karya ilmiah penulis dengan karya ilmiah yang sebelumnya.

1. Indah Ayuning Tias, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017 dengan judul Analisis Peran Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dalam Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Masyarakat Desa Purworejo Kabupaten Pesawaran).¹⁸ Penelitian ini membahas tentang peran program KPS di Desa Purworejo dalam pengentasan kemiskinan di dalam perspektif hukum Islam. KPS atau Kartu Perlindungan Sosial adalah program kebijakan berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang didistribusikan kepada

¹⁸ Indah Ayuning Tias, "Analisis Peran Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dalam Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Masyarakat Desa Purworejo Kabupaten Pesawaran)" "(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), <http://repository.radenintan.ac.id/2415/>

masyarakat, adapun hal ini salah satunya berbentuk beras yang termasuk dalam subsidi pangan yang salah satunya yaitu Raskin atau beras miskin yang disalurkan kepada masyarakat kurang mampu. Adapun hasil dari penelitian terdahulu ini, bahwa program KPS masih belum efektif dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Purworejo. Sehingga program KPS ini jika ditelaah lagi pelaksanaannya saat ini hanya berupa membantu mengurangi beban kebutuhan pangan saja.

2. Ahda Sulukin Nisa, Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015 dengan Judul Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).¹⁹ Penelitian ini membahas tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan di tinjau dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai ini belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut dan hanya berfungsi sebagai penekan biaya

¹⁹ Ahda Sulukin Nisa, “Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/RJMBI/article/view/5762>

pengeluaran rumah tangga miskin saja. Pada penelitian ini juga ditunjukkan bahwa jika ditelaah dari nilai ekonomi Islam, BPNT ini hanya sebagai tanggung jawab dari pemerintah untuk masyarakatnya yang dapat menimbulkan hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat dan juga memenuhi nilai jaminan sosial.

3. Tomi Predianto, Khoirurrosyidin, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020 dengan judul Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19.²⁰ Penelitian ini membahas tentang program Kartu Prakerja yang seharusnya efektif untuk dapat menciptakan masyarakat yang mampu dan berdaya juga mengurangi ketergantungan dengan orang lain dan dampaknya di lapangan yang ditemukan sejauh peneliti meneliti ini. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa program Kartu Prakerja tidak efisien karena banyak masyarakat kecil yang seharusnya bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini tidak dapat mendapatkannya karena keterbatasan kuota dan adanya tahap seleksi di dalamnya. Sehingga anggaran dana yang bertotalkan triliunan harus diperhatikan dan dikaji ulang oleh pemerintah agar lebih efektif dalam merealisasikan program dan mencapai tujuan yang sudah dirancang sebelumnya dengan memperbaiki prosedurnya.

²⁰ Tomi Predianto, Khoirurrosyidin, "Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19," 115.

4. Rani Ika Wijayanti, Ana Humardhiana, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020 dengan judul Optimalisasi Program Kartu Prakerja dengan Pelatihan Branding Strategy.²¹ Penelitian ini terfokus pada pemberian pelatihan berupa *Branding Strategy* kepada calon entrepreneur untuk memantapkan langkahnya dalam berpartisipasi pada program pelatihan Kartu Prakerja. Hasil dari penelitian ini dengan adanya pelatihan *Branding Strategy* yang diberikan peneliti kepada peserta pelatihan atau pendampingan ini, peserta dapat merancang, memetakan juga mengaplikasikan materi dasar atau *basic branding strategy* agar *brand* yang mereka miliki siap untuk bersaing di kalangan masyarakat.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Indah Ayuning Tias (2017), Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Analisis Peran Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dalam Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam	Objek kajian dalam penelitian yaitu mengenai kebijakan pemerintah berupa bantuan untuk masyarakat.	- Penelitian ini memfokuskan untuk membahas tentang peran program KPS dalam pengentasan kemiskinan di Desa

²¹ Rani Ika Wijayanti, Ana Humardhiana, "Optimalisasi Program Kartu Prakerja dengan Pelatihan Branding Strategy," *dimasejati*, no. 1(2020): 109
<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/dimasejati/article/view/6645>

		(Studi Pada Masyarakat Desa Purworejo Kabupaten Pesawaran).		<p>Purworejo dengan indikator efektivitas program KPS dan dianalisis menurut perspektif ekonomi Islam.</p> <p>- Penelitian ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan kartu prakerja ditinjau dari perspektif <i>mashlahah mursalah</i>.</p>
2.	Ahda Sulukin Nisa (2015), mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan	Objek kajian dalam penelitian yaitu mengenai kebijakan pemerintah berupa bantuan untuk masyarakat.	- Penelitian ini membahas tentang proses terlaksananya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

		Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).		<p>di Desa Merak Batin untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ditinjau dengan perspektif ekonomi Islam.</p> <p>- Penelitian ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan kartu prakerja ditinjau dari perspektif <i>mashlahah mursalah</i>.</p>
3.	Tomi Predianto, Khoirurrosyidin (2020), mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo	Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif	<p>- Objek penelitian keduanya yaitu Program Kartu Prakerja.</p> <p>- Pembahasan sama-sama</p>	<p>- Penelitian ini membahas tentang efektivitas program Kartu Prakerja dalam perspektif</p>

		Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19.	mengenai tingkat efektivitas dari implementasi kartu prakerja.	pemberdayaan dan dampaknya di lapangan. - Penelitian ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan kartu prakerja ditinjau dari perspektif <i>mashlahah mursalah</i> .
4.	Rani Ika Wijayanti, Ana Humardhiana (2020), Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Optimalisasi Program Kartu Prakerja dengan Pelatihan <i>Branding Strategy</i>	Objek penelitian keduanya yaitu Program Kartu Prakerja.	- Penelitian ini terfokus pada pemberian pelatihan strategi branding untuk usaha mikro agar masyarakat lebih yakin untuk bisa memasarkan produknya. - Penelitian ini

				membahas tentang efektivitas pelaksanaan kartu prakerja ditinjau dari perspektif <i>mashlahah</i> <i>mursalah.</i>
--	--	--	--	--

B. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun, yang mana biasanya dilakukan saat seluruh rancangannya sudah dianggap sempurna. Adapun menurut Nurdin Usman, implementasi tidak

hanya sebuah aktivitas, tapi merupakan suatu kegiatan yang sudah terencana dan memiliki tujuan tertentu.²² Implementasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah pelaksanaan dari program kartu prakerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah yang mana program ini sudah disusun dan dirancang kemudian diluncurkan di kala pandemi COVID-19.

C. Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Pengertian Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah penduduk yang siap dan mampu untuk memberikan tenaga atau akalunya untuk mencapai tujuan sebuah

²² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

organisasi, yang mana sumber daya manusia ini meliputi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.²³

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk peningkatan kualitas pekerja dan biasanya membutuhkan biaya yang besar dan pekerja akan memberikan timbal baliknya dengan peningkatan penghasilan pada perusahaan. Pengembangan ini dilakukan karena sumber daya manusia merupakan investasi yang besar untuk pembangunan nasional.²⁴ Adapun tujuan dari pengembangan ini dilakukan untuk menjadikan sumber daya manusia yang produktif yang sebelumnya potensial.²⁵

3. Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pelatihan akan memberikan sumber daya manusia pengetahuan dan keterampilan pembelajaran yang mana akan dapat mendapatkan keterampilan bekerja dengan segera, sehingga pekerja akan memperoleh pengetahuan lebih saat ikut pelatihan dan pelatihan ini biasanya digunakan untuk posisi baru dalam bekerja atau tuntutan kebutuhan.²⁶

Pelatihan yang diberikan juga diharapkan dapat meningkatkan seluruh

²³Samsuni, "Manajemen Sumber Daya Manusia," *Al-Falah*, No. 1 (2017): 113
<http://ejurnal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/alfalahjikk/article/view/19/88>

²⁴ Priyono Tjiptoherijanto, *Untaian Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 1.

²⁵ Priyono Tjiptoherijanto, *Untaian Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 3.

²⁶ Wibowo, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi)*, (Surabaya: CV.R.A. De. Rozarie, 2017), 49.

kemampuan pekerja, baik dalam pemahaman pemecahan masalah, mengatur emosi dan praktiknya untuk sigap menyelesaikan pekerjaan dan pelatihan diberikan untuk semua jenjang. Pelatihan ini sebaiknya dibuat semenarik mungkin agar pekerja tertarik mengikuti pelatihan, memberikan properti yang dapat membuat pekerja termotivasi, sehingga pelatihan ini bisa diaplikasikan oleh pekerja dikemudian hari.²⁷

D. Sistem Informasi Ketenagakerjaan

Sistem Informasi Ketenagakerjaan biasa juga disebut dengan SISNAKER, merupakan platform digital yang melayani bidang ketenagakerjaan dan berbagai jenis layanan publik baik di pusat maupun di daerah.²⁸ Dengan adanya SISNAKER ini, masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan jelas dan seluruh masyarakat dapat mengakses SISNAKER ini.

Adapun SISNAKER ini memiliki beberapa layanan menyangkut tentang teknis ketenagakerjaan yakni layanan pusat bantuan, WLKP, pengajuan PP dan PKB, karirhub, job fair, kelembagaan, pelatihan kerja, 1 data ketenagakerjaan, produktivitas, sertifikasi, Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, program latihan, pemagangan, subsidi upah, penggunaan TKA, linkabilitas, K3 corona, Lembaga K3. Sedangkan layanan

²⁷ Makmuri Muchlas. *Perilaku Organisasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), 105.

²⁸ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, diakses pada 11 Februari 2021, <https://kemnaker.go.id/>

lainnya merupakan layanan pendukung yakni aplikasi pengadaan, berita, data informasi, dan regulasi ketenagakerjaan, dan semua layanan ini terdapat dalam 1 website Kementerian Ketenagakerjaan yaitu SISNAKER.²⁹

E. Mashlahah mursalah

1. Pengertian *Mashlahah mursalah*

Mashlahah berasal dari kata *al-shulhu* yang memiliki makna sama dengan al-manfa'at yakni kenikmatan yang mana akan mengantarkan kepada kenikmatan.³⁰ Kata mashlahah merupakan kata dari bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia menjadi *masalah* dan telah dibakukan. Menurut bahasanya, *mashlahah mursalah* ini berasal dari kata *saluha*, *yashluhu*, *salahan* صلاح، يصلح، صلاحا yang artinya adalah sesuatu yang baik, bermanfaat. Sehingga, segala perbuatan yang membawa manusia kepada suatu kebaikan sehingga bisa mendapatkan manfaat itu disebut dengan mashlahah.³¹ Sehingga dengan menggunakan akal sehat manusia, manusia diperintahkan untuk berpikir mana yang mendatangkan

²⁹ Anonim, "Apa Itu Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER)?," *Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat*, 3 Oktober 2020, diakses 13 Februari 2021, [https://disnakertrans.ntbprov.go.id/apa-itu-sistem-informasi-ketenagakerjaan-sisnaker/#:~:text=Sistem%20Informasi%20Ketenagakerjaan%20\(Sisnaker\)%20adalah,mengarah%20pada%20otomasi%20dan%20digitalisasi.&text=Ini%20lantaran%20core%20bisnis%20Kemnaker,tenaga%20kerja%20dan%20stakeholder%20terkait](https://disnakertrans.ntbprov.go.id/apa-itu-sistem-informasi-ketenagakerjaan-sisnaker/#:~:text=Sistem%20Informasi%20Ketenagakerjaan%20(Sisnaker)%20adalah,mengarah%20pada%20otomasi%20dan%20digitalisasi.&text=Ini%20lantaran%20core%20bisnis%20Kemnaker,tenaga%20kerja%20dan%20stakeholder%20terkait).

³⁰ Dr. KH. M. Ma'shum Zein, M.A., *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Jogjakarta: Pustaka Pesantren, 2016), 161.

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 368.

mashlahah bagi umat manusia, dan mana yang bisa mendatangkan bahaya bagi manusia.

Sedangkan kata mursalah memiliki makna terlepas atau tidak terikat dengan Al-Qur'an maupun hadits, baik untuk melarangnya ataupun menganjurkannya.³²

Sedangkan, menurut istilah para ahli memberikan definisi *mashlahah mursalah* yang berbeda-beda, diantaranya ialah :³³

1. Al-Ghazali dalam kitab *al-mustasyfa* menjelaskan bahwa *mashlahah mursalah* adalah :

ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين

Artinya: “Apa-apa (*mashlahah*) yang tidak ada bukti bagi-Nya dari *syara'* dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.”

2. Menurut Yusuf Hamid Al-Alim menyebutkan definisi yang *mashlahah mursalah* yakni :

ما لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها

Artinya: “Apa-apa (*mashlahah*) yang tidak ada petunjuk *syara'* tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya.”

³² Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 16.

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 377.

3. Abd al-Wahhab al-Khallaf menjelaskan :

إنها مصلحة لم يرد عن الشارع دليل لاعتبارها أو لإلغائها

Artinya : “*Mashlahah mursalah* ialah *mashlahat* yang tidak ada *dalil syara’* datang untuk mengakuinya atau menolaknya.”

4. Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi :

هي المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الإسلامي ولا يشهد لها أصل خاص

بالاعتبار أو بالإلغاء

Artinya : “*Mashlahah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.”

5. Para ahli ushul memberikan pengertian terkait *mashlahah mursalah* yakni :

“Memberikan hukum syara’ kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam *nash* atau *ijma’* atas dasar memelihara kemaslahatan.”³⁴

Masih banyak ahli ushul fiqh yang memberikan pengertian terkait *mashlahah mursalah*, namun karena pengertiannya cenderung sama maka dari banyak pengertian di atas. Yang mana *mashlahah mursalah* adalah cara menetapkan suatu hukum dengan pertimbangan kemaslahatan

³⁴ H.A. Djazuli, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 86.

banyak orang.³⁵ dapat dilihat bahwa sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan menolak bahaya atau mudharat untuk khalayak umum, yang mana sesuatu itu tidak ada nash atau dalil yang membenarkannya atau melarangnya dan tidak ada kesamaan illat dengan kasus sebelumnya, sehingga sesuatu itu diberikan hukum sesuai dengan hukum syara' dan tujuan syara' maka sesuatu tersebut disebut dengan *mashlahah mursalah*.

Sehingga, definisi mashlahah secara istilah ini adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, menjauhkan dari kerusakan, dipandang baik oleh akal dan juga sesuai dengan tujuan syara' untuk menetapkan suatu hukum.³⁶

Adanya mashlahah ini dikarenakan suatu kasus yang tidak terdapat ketentuan hukumnya, illat yang sama dengan kasus yang lain, namun ditemukan sesuai ketentuan hukum syara', yang menolak bahaya dan menerima manfaat, maka kasus itu disebut dengan *mashlahah mursalah*.³⁷

³⁵ Dr. H. Moh. Padil, M.Pd.I. dan Dr. M. Fahim Tharaba, M.Pd., *Ushul Fiqh* (Malang: Madani, 2017), 105.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 369.

³⁷ Dr. KH. M. Ma'shum Zein, M.A., *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, 162.

2. Dasar Hukum Mashlahah

Ketentuan syariat yang telah diberikan kepada manusia, mengandung kemaslahatan untuk manusia yang mengatur kehidupan manusia, yang mana terkandung di dalam Q.S. Yunus ayat 57:³⁸

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya : "Hai manusia! Sesungguhnya telah datang kepadamu nasehat dari Tuhan kamu dan penawar bagi (penyakit) yang ada pada dada-dada (kamu) dan (telah datang) petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin."³⁹

Dalam tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan sebagai obat hati, petunjuk untuk selalu berada di jalan yang lurus, karena di dalamnya berisi peringatan, anjuran dan larangan untuk menghindari sesuatu. Sehingga, Allah menurunkan Al-Qur'an yang digunakan untuk kemaslahatan manusia di muka bumi, diturunkan karena mengandung rahmat di dalamnya dan akan mewujudkan keselamatan dan menjauhkan dari marabahaya jika mengikutinya.

³⁸ H.A. Djazuli, Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 173.

³⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Mushaf Lafziyyah Al-Huda* (Depok: Al-Huda Kelompok GEMA INSANI, 2009), 216.

Mashlahah mursalah merupakan hukum syara' yang di dasari dengan kepentingan seluruh orang, yang dapat menimbulkan kebaikan dan mencegah keburukan, begitu juga dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.

3. Objek *Mashlahah mursalah*

Adapun objek dari *mashlahah mursalah* adalah sesuatu yang untuk menetapkan hukumnya harus berlandaskan oleh syara', digunakan untuk kepentingan umum, dan ditujukan untuk perkara yang tidak ada petunjuk penolakan atau penerimaan oleh syara' namun dikuatkan dengan kebaikan menurut akal. Sesuatu ini berkaitan dengan amaliyah dan sejenenisnya.⁴⁰

4. Jenis-jenis Mashlahah

Dalam menetapkan suatu hukum, syariat memiliki beberapa tujuan agar dapat tercipta kemashlahatan bagi manusia, adapun tujuan itu ada 5,

⁴⁰ H. Moh. Padil. dan M. Fahim Tharaba, *Ushul Fiqh*, 106.

yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan terakhir memelihara harta benda. Untuk mewujudkan kemashlahatan manusia, ke lima tujuan syariat tersebut haruslah dipenuhi karena mereka memiliki urgensi masing-masing.

Menurut kekuatan substansinya, mashlahah terbagi menjadi 3 macam, yaitu :⁴¹

1. *Mashlahah dharuriyyah* adalah kepentingan yang sangat dibutuhkan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, disebut juga sebagai kebutuhan primer. Seperti kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan, harta.⁴² Allah memerintahkan kepada manusia untuk terlebih dahulu memenuhi kebutuhan pokok ini karena tanpa adanya lima pokok kebutuhan tersebut, akan membuat kehidupan manusia tidak ada apa-apanya, bahkan dapat menimbulkan kerusakan pada tatanan kehidupan manusia dan pokok-pokok ini merupakan dasar yang paling utama untuk mashlahah yang lainnya.⁴³
2. *Mashlahah hajiyyah* merupakan bentuk kemashlahatan yang tidak secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dan menyempurnakan kebutuhan pokok manusia, sehingga posisi derajatnya berada dibawah *mashlahah dharuriyyah*, yang mana jika mashlahah ini

⁴¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Zikrul, 2004), 82-84.

⁴² Amin Farih, *Kemashlahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18.

⁴³ Amin Farih, *Kemashlahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 16.

tidak ada maka akan terdapat kesempitan atau kekurangan terhadap manusia. Kemashlahatan ini diperlukan oleh manusia untuk memudahkan dan menghilangkan kesulitan dalam melaksanakan segala sesuatu dalam kehidupan dan menjaga lima unsur pokok kehidupan.⁴⁴

3. *Mashlahah tahsiniyyah* merupakan kepentingan yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan manusia layaknya kebutuhan tersier dan biasanya kepentingan ini hanya untuk hiasan hidup.⁴⁵ *Mashlahah* ini mengambil dari kebiasaan dan menghindari cara-cara yang kurang baik di mata akal sehat manusia, karena dengan tidak adanya kemashlahatan ini, seseorang akan dipandang tidak ikut aturan atau tidak bermartabat.⁴⁶

Dari segi cangkupannya, *mashlahah* ini terbagi menjadi 3, yakni :

1. *Mashlahah ‘Ammah* adalah *mashlahah* yang berlaku untuk masyarakat umum, sehingga kemashlahatan yang ada akan dirasakan oleh seluruh masyarakat karena mencakup kepentingan banyak orang.

⁴⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 310.

⁴⁵ Amin Farid, *Kemashlahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18.

⁴⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 310.

2. Mashlahah Khashshah adalah mashlahah yang berlaku untuk beberapa orang saja yang mana kemashlahatan ini dirasakan secara pribadi.⁴⁷
3. Mashlahah yang tidak berkaitan bagi semua orang, tapi hanya mayoritas saja. Karena kemashlahatannya hanya dirasakan oleh orang-orang yang berkaitan dengan sesuatu tersebut.⁴⁸

Mashlahah ditinjau dari keserasiannya dan eksistensinya, terbagi menjadi tiga, yakni :⁴⁹

1. Mashlahah mu'tabarah merupakan mashlahah yang keberadaannya diberi petunjuk oleh syara', baik itu menerima atau menolak kemashlahatan ini untuk dijadikan alasan dalam menetapkan suatu hukum. Mashlahah ini masih terbagi menjadi dua, yaitu :
 - a. Munasib mu'atstsir yakni mashlahah yang keberadaannya terdapat petunjuk secara langsung oleh syara' baik berbentuk nash atau ijma'.
 - b. *Munasib mula'imah* yakni mashlahah yang tidak ada petunjuk langsung dari syara' untuk keberadaannya, namun ada petunjuk dari syara' yang karena keadaan yang sejenis menjadikan sesuatu itu sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.

⁴⁷ Intan Laitlatul Mahmudah, "Implementasi Perlindungan Hukum Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI Tulungagung," (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/view/divisions/JHBS/2020.html>.

⁴⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 314.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 373-377.

2. *Mashlahah al-mulghah* adalah mashlahah yang menurut akal itu baik, akan tetapi tidak terdapat syara' yang menunjukkan untuk menerimanya, namun terdapat syara' yang menunjukkan untuk menolaknya.
3. *Mashlahah mursalah*, yakni kemashlahatan yang tidak terdapat petunjuk syara' untuk menerima ataupun menolaknya, akan tetapi dianggap baik oleh akal manusia juga sesuai dengan tujuan syara'.

5. Syarat *Mashlahah mursalah*

Terdapat syarat-syarat yang membuat *mashlahah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum, berikut menurut pendapat menurut jumhur ulama, mashlahah ini harus mashlahah yang sejati yang dapat membawa manfaat dan menolak suatu mudharat, tidak hanya itu mashlahah haruslah mengandung kemaslahatan umum yang mana manfaatnya harus dirasakan oleh seluruh masyarakat umum bukan hanya untuk kepentingan pribadi saja dan yang terakhir mashlahah tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits.⁵⁰

6. Kehujjahan *mashlahah mursalah*

Kehujjahan *mashlahah mursalah* juga tidak sepenuhnya disepakati oleh imam madzhab, ada yang berpendapat boleh dijadikan hujjah ada pula yang tidak membolehkannya. Kelompok yang menerima *mashlahah mursalah* tidak serta merta menerimanya secara mutlak, tapi harus ada

⁵⁰ H. Moh. Padil. dan M. Fahim Tharaba, *Ushul Fiqh*, 106.

catatan yang menjelaskan bahwa keputusan yang diambil juga mempertimbangkan tujuan syara' dan mempertimbangkan dengan syarat-syarat keberlakuan *mashlahah mursalah*, adapun kelompok yang menerima adalah sebagian dari Syafi'iyah termasuk al-Ghazali dan Malikiyyah.⁵¹ Untuk kelompok yang tidak menerima *mashlahah mursalah* adalah Hanafiyyah, Hanbali, sebagian Syafi'iyah dan Malikiyyah dianggap karena *mashlahah* tidak memiliki kekuatan hujjah sehingga tidak diperbolehkan untuk beristinbat hukum syar'i.⁵²

F. *Mashlahah mursalah* menurut Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali merupakan ulama yang berasal dari kalangan madzhab Syafi'i, Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan yang dalam dan rinci terkait *mashlahah* dan merupakan ulama yang pertama karena penjelasannya secara rinci.⁵³ Beliau adalah tokoh besar madzhab Syafi'i, yang juga dianggap sebagai "*Hujjat al-Islam*" atau ensiklopedia ilmu pengetahuan Islam dan berpengaruh pada pemikiran Islam modern, tidak hanya itu beliau dianggap sebagai guru dari Imam al-Syatibi karena pendekatan terkait *mashlahah mursalah* ini hampir sama.⁵⁴

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 380-381.

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 382.

⁵³ Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali," *Diktum*, No.1(2020): 120, <http://ejournal.iainpare.ac.id>

⁵⁴ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan*, No. 2(2018): 356 <https://ejurnal.iq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49/35>

Imam Al-Ghazali membahas *mashlahah mursalah* pada empat karyanya, *al-Mankhul*, *Asas al-Qiyas*, *Shifa' al-Ghalil* dan *al-Mustashfa*, kemudian pengertian dan pembagian *mashlahah* menurut beliau juga digunakan oleh para ulama setelah beliau.⁵⁵

Menurut Imam Al-Ghazali, *mashlahah* adalah sesuatu ketetapan hukum yang tidak ada nash yang menolak atau menyetujuinya.⁵⁶ Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa *mashlahah* ini dibuat untuk mencari suatu manfaat dan menghindari bahaya dan sesuai dengan tujuan maqashid syariah, yang mana maqashid syariah ini ditujukan pada pemeliharaan lima pokok prinsip kehidupan yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta.⁵⁷ Sehingga, Imam Al-Ghazali menurut pandangan teologinya, menolak untuk menggunakan *mashlahah* jika hanya untuk kemanfaatan manusia, karena dikhawatirkan hanya untuk memenuhi hawa nafsu manusia tanpa ada pertimbangan dengan nash yang ada, dan meletakkan *mashlahah* berada tepat dibawah qiyas sehingga dapat dilihat bahwa Imam Al-Ghazali tidak serta merta untuk menolak adanya *mashlahah mursalah* ini, namun untuk menetapkannya Imam Al-Ghazali tidak melakukannya secara mutlak atau tidak dengan pemikiran yang independen dan tidak menjadi bagian dari empat sumber

⁵⁵ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," 123

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 377.

⁵⁷ Akbar Sarif, "Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali," *Tsaqafah*, No. 2(2017): 357 <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183>

hukum Islam utama yang disepakati, karena *mashlahah* hanya sebagai pelengkap dari ke empat sumber hukum utama, Al-Qur'an, al-Sunnah, *ijma'*, *qiyas*.⁵⁸

Sehingga, segala sesuatu yang ditetapkan untuk memelihara tujuan syariat yang lima dan menghindarkan untuk merusak tujuan syariat itu adalah *mashlahah mursalah*.⁵⁹ Imam Al-Ghazali menilai *mashlahah* sejalan dengan *istihsan* karena sama-sama tidak memiliki validalitas seperti *qiyas* karena validalitas itu didukung oleh nash yang ada, sedangkan *istishlah* tidak ada yang mendukung atau menolaknya. Menurutny, metode *istishlah* adalah *ushul mauhumah* atau prinsip mujtahid setiap memberikan ketetapan atau menyandarkan diri pada akalny daripada hadits.⁶⁰

Imam Al-Ghazali membagi *mashlahah* menjadi tiga dalam kitab *al-mustashfa*, yaitu *mashlahah mu'tabarah* merupakan *mashlahah* yang dibenarkan oleh *syara'* yang mana itu merupakan *qiyas* yang mengambil hukumny dari nash juga *ijma'*. Yang kedua adalah *mashlahah mulghah* yakni *mashlahah* yang tidak terdapat petunjuk dari nash untuk menyetujuiny, namun ada petunjuk dari nash untuk menolaknya, sehingga *mashlahah* yang kedua ini tidak dapat dijadikan hujjah karena dibatalkan oleh *syara'* sedangkan *mashlahah* yang ketiga adalah

⁵⁸ Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali," 125-126.

⁵⁹ Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali," 120.

⁶⁰ Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali," 124.

mashlahah yang tidak dibenarkan dan tidak disalahkan oleh syara' atau bisa dikatakan tidak ada dalil yang khusus untuk menyetujui atau menolaknya sehingga mashlahah inilah yang disebut dengan *mashlahah mursalah*.⁶¹

Imam Al-Ghazali memberikan persyaratan yang cukup ketat terkait dengan kehujjahan *mashlahah mursalah*, yang mana ini sebagai bentuk kehati-hatian agar kemaslahatan yang ada tidak hanya berdasarkan hawa nafsu manusia, persyaratan tersebut antara lain :

1. Mashlahah harus sejalan dengan syara'.
2. Tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum utama dengan nash.
3. Mashlahah hanya berlaku pada muamalah saja.
4. Mashlahah yang ditetapkan harus berkaitan dengan mashlahah yang diutamakan, sehingga tingkat kebutuhannya harus diperhatikan, apakah keberadaan dari mashlahah ini bisa mengancam lima tujuan pokok kehidupan atau tidak, bisa juga mashlahah berada di posisi hajiyyah yang mendekati dharuriyyah.
5. Mashlahah harus qath'i, sehingga tidak hanya berdasarkan perkiraan saja sehingga kemaslahatan ini sudah pasti akan didapatkan, atau berada di posisi dzanny yang mendekati qath'i.

⁶¹ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," 128.

6. Mashlahah bersifat kulli sehingga berlaku secara umum dan bermanfaat bagi seluruh umat Islam atau universal.⁶²

⁶² Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," 130-131.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis hukum empiris, yang mana penelitian ini dilakukan dengan langsung datang ke lapangan dan meneliti pelaksanaannya di masyarakat.⁶³ Sehingga pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian yang sesuai dengan fakta yang ada di lingkungan masyarakat yang melakukan pendaftaran pada program Kartu Prakerja baik yang lolos maupun yang tidak lolos kemudian peneliti mengkajinya dengan menggunakan Peraturan Presiden No.76 Tahun 2020 dan *Mashlahah mursalah*. Data primer untuk penelitian ini dilakukan dengan langsung berinteraksi melalui sosial media Tiktok.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah yuridis sosiologis, yakni pendekatan yang mengkaji hukum yang terdapat dalam kehidupan sosial dengan menganalisis tentang reaksi masyarakat terhadap norma yang ada.⁶⁴ Adapun tekniknya yakni dengan analisis deskriptif kualitatif.

⁶³ Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), 150.

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020), <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

C. Lokasi penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini di akun tiktok @panduanprakerja dan pemirsa konten videonya yang termasuk ke dalam pendaftar kartu prakerja @ayangcity, @restyya1, @hamzah, @incesmarta.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer adalah data yang berasal dari lapangan yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara dengan masyarakat yang lolos program kartu prakerja atau yang belum lolos program kartu prakerja, humas kementerian ketenagakerjaan. Data ini merupakan data yang didapatkan dari informan yang berkaitan dengan problem yang akan dibahas yakni implementasi perpres nomor 76 tahun 2020 tentang peningkatan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja perspektif mashlahah mursalah.
2. Data sekunder adalah data yang berupa dokumen atau tulisan seperti buku, penelitian yang sebelumnya baik jurnal, skripsi, tesis atau disertasi, selain itu data sekunder juga bisa di dapat dari undang-undang, putusan pengadilan dan lainnya.⁶⁵ Sehingga peneliti menggunakan Perpres no. 76 Tahun 2020, Permenko Perekonomian no. 11 tahun 2020, jurnal, berita online yang

⁶⁵ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafola, 2014), 52.

berkaitan dengan kartu prakerja, buku-buku yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia dan *mashlahah mursalah* untuk penunjang data primer pada penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data terkait permasalahan yang akan dianalisis oleh penulis melalui beberapa cara, diantaranya:

1. Studi dokumen : dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang berupa tulisan maupun gambar yang didapat dari dokumen resmi, arsip, buku, dokumen pribadi dan foto yang berhubungan dengan penelitian ini.⁶⁶ Peneliti melakukan studi terhadap data-data yang berkaitan dengan kartu prakerja dan *mashlahah mursalah*.
2. Wawancara dan interview : wawancara ini dilakukan melalui *whatsapp* dan pesan langsung pada aplikasi Tiktok, yang mana wawancara ini untuk mendapatkan data-data terkait proses pelaksanaan program kartu prakerja dan keterkaitan lebih lanjut antara SISNAKER dengan program Kartu Prakerja dan juga untuk mengetahui latar belakang masyarakat yang lolos program kartu prakerja maupun tidak.

⁶⁶ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

F. Metode Pengolahan Data

Pengelolaan data dilakukan saat setelah data terkumpul dan diperlukan beberapa tahapan untuk sampai ke hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahap yakni :⁶⁷

- a. Editing, data yang bersumber dari beberapa referensi seperti wawancara, dokumentasi, beberapa buku dan jurnal akan di teliti kembali dan dilakukan pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan.
- b. Klasifikasi, data di klasifikasi atau mengelompokkannya menjadi beberapa kategori agar lebih sistematis dan mendapatkan pembahasan yang sesuai untuk penelitian ini.
- c. Verifikasi, tahap ini dilakukan untuk memeriksa data yang telah didapatkan sebelumnya agar memiliki kejelasan sumber dan data yang telah didapatkan bisa dipertanggungjawabkan dan valid.
- d. Analisis, memberikan interpretasi pada data sesuai dengan kategori atau sub babnya yang dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif.

⁶⁷ Rachma Fadila Anggitafani, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No. 1/PJOK.07/ 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan." (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020) <http://etheses.uin-malang.ac.id/25192/>

- e. Kesimpulan, terakhir pemberian beberapa kesimpulan terkait dengan objek penelitian ini.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kartu Prakerja

Program Kartu prakerja merupakan suatu program untuk mengembangkan kemampuan dalam bekerja dan kewirausahaan untuk pencari kerja, juga untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, pekerja yang ingin meningkatkan kualitas kerjanya juga untuk pelaku usaha mikro dan kecil.⁶⁸ Adapun program ini adalah bagian dari bantuan sosial untuk penganggulungan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Program ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020. Serta peraturan pelaksanaannya Permenko Perekonomian Nomor 11 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

⁶⁸ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, diakses 15 November 2020, <https://www.prakerja.go.id/tentang-kami>

Sedangkan kartu prakerja adalah kartu yang digunakan sebagai identitas para penerima manfaat Program Kartu Prakerja atau peserta dari program ini.⁶⁹

Dalam setiap program yang dirancang oleh pemerintah pasti memiliki tujuan dari program itu sendiri, begitu juga untuk program kartu prakerja, terdapat beberapa tujuan yang harus dituju dari program itu sendiri, yakni:

- a. mengembangkan kompetensi kerja baik untuk pekerja atau wirusahawan.
- b. meningkatkan daya saing dan produktivitas masyarakat.
- c. mengembangkan sikap kewirausahaan bagi masyarakat.⁷⁰

Setiap orang yang berhasil lolos untuk mengikuti program Kartu Prakerja, akan mendapatkan uang pelatihan sebesar Rp 1.000.000,00, layanan pelatihan kartu prakerja, sertifikat pelatihan dan juga biaya insentif sesuai mengikuti pelatihan Kartu Prakerja.

Pelatihan Kartu Prakerja ini diutamakan ditujukan bagi mereka para pencari kerja, namun disisi lain program ini juga diperuntukkan bagi pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena PHK, dipulangkan, pelatihan ini juga diberikan kepada pekerja atau buruh dan masyarakat lain yang memiliki

⁶⁹ Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

⁷⁰ Pasal 2 Perpres Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020.

usaha mikro dan kecil yang ingin meningkatkan kualitas potensi kerjanya, yang mana di dalamnya termasuk pekerja yang dipulangkan oleh pengusahanya.⁷¹

Dalam Pasal 2 ayat (6) Permenko Perekonomian Nomor 11 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja dijelaskan bahwa calon penerima Kartu Prakerja adalah mereka yang terdampak COVID-19 dan juga pandemi COVID-19 dan disyaratkan mereka yang belum sama sekali menerima bantuan selama pandemi COVID-19.⁷² Yang mana di dalamnya termasuk dan sesuai pada pasal pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden 76 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres 36 tahun 2020, namun dalam arti pemutusan hubungan kerjanya sesuai pada

⁷¹ Pasal 3 ayat 3 Perpres Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020.

⁷² Pasal 2 ayat (6) Permenko Perekonomian Nomor 11 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

peraturan pelaksanaannya yakni diputus hubungan kerjanya atau dipulangkannya karena dampak dari pandemi COVID-19.⁷³

Tidak serta merta mereka yang ingin mencari pekerjaan atau meningkatkan kualitas kewirausahaannya, terdapat syarat-syarat yang harus dilengkapi terlebih dahulu untuk bisa mendaftar di program ini yakni harus berwarga negara Indonesia, usia harus sudah mencapai 18 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan seperti sekolah atau kuliah.⁷⁴

B. Analisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 di masyarakat

Program kartu prakerja diluncurkan karena banyaknya pengangguran, pemutusan hubungan kerja yang sekarang sedang melanda di masyarakat penduduk Indonesia, membuat pemerintah segera meluncurkan kebijakan yang diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat, dengan program pengembangan sumber daya manusia yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi kerja untuk angkatan kerja. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja

⁷³ Pasal 2 ayat (6) Permenko Perekonomian Nomor 11 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

⁷⁴ Pasal 3 ayat 4 Perpres Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020.

melalui Program Kartu Prakerja menjadi dasar dalam pelaksanaan program ini. Tujuan pembuatan program ini sesuai dengan tujuan program kartu prakerja pada pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa :

“Program Kartu Prakerja bertujuan : a. mengembangkan kompetensi angkatan kerja; b. meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja; dan c. mengembangkan kewirausahaan.”

Pada pasal ini dijelaskan terkait tujuan program kartu prakerja yang mana, program ini adalah kebijakan publik dan program ini ada karena COVID-19 dan datang untuk menangani dampak COVID-19 yakni dengan :⁷⁵

1. Membantu meringankan biaya pelatihan yang dapat digunakan untuk membeli pelatihan kartu prakerja dengan nominal bantuan sebesar Rp 1.000.000,00.
2. Mendapatkan insentif dengan total 2.550.000, dengan perincian 600.000 per bulan selama empat bulan sebagai insentif setelah penyelesaian pelatihan pertama dan 50.000 per survei sebanyak tiga kali survei.

Sehingga bisa digaris bawahi bahwa program ini untuk angkatan kerja, angkatan kerja ialah mereka yang sudah berusia di atas 15 - 65 tahun, baik

⁷⁵ Intan Support Kemnaker, “Apa Manfaat Kartu Prakerja,” *Sistem Informasi Ketenagakerjaan*, 16 Maret 2021, diakses 22 April 2021, <https://bantuan.kemnaker.go.id/support/solutions/articles/43000568759-apa-manfaat-kartu-prakerja->

yang telah bekerja, belum bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan dan program ini diberikan untuk mereka yang terdampak COVID-19, mereka inilah yang masuk ke dalam kategori angkatan kerja, yang akan dikembangkan potensinya pada program kartu prakerja ini. Namun, jika melihat dari hasil survei BPS terkait jenis kegiatan utama pendaftar program ini, sebanyak 66,47% masih bekerja dan pengangguran berada di 22,24% saja, disayangkan sekali para penganggur yang lebih membutuhkan program ini, hanya diterima sebesar 22,24% saja. Sedangkan, di dalam Pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa program Kartu Prakerja diberikan untuk pencari kerja, barulah di pasal 3 ayat (3) memberikan tambahan terkait siapa saja penerima program ini selain pencari kerja. Hal ini perlu ada penindakan untuk memperbaiki proses verifikasi penerimaan agar lebih tepat sasaran, terlebih lagi adanya posisi bagi mereka yang bukan angkatan kerja dapat lolos mengikuti program ini, yang mana menurut tujuannya program ini ditujukan untuk angkatan kerja, namun dengan presentase sebesar 11,29% masih diduduki oleh mereka yang bukan angkatan kerja, dengan melihat presentase ini diharapkan pemerintah bisa memperbaiki proses penerimaan.

Pada 17 Maret 2021 lalu Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa 88,9% responden dari survei yang dilakukan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik mengakui bahwa program kartu prakerja bisa meningkatkan keahlian yang mereka miliki, yang mana keahlian dan keterampilan sangatlah

dibutuhkan untuk bisa maju dalam arus persaingan dimasa sekarang ini.⁷⁶

Data ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

1.1 Badan Pusat Statistik



Hasil dari wawancara dengan narasumber penerima program Kartu Prakerja menyampaikan dalam wawancaranya bahwa ia mengikuti program Kartu Prakerja pada bidang pembuatan cv dan ia juga menyatakan bahwa Kartu Prakerja memberikan pengaruh pada dirinya dan dibuktikan dengan diterimanya dia di tempat kerja berkat ilmu yang didapat dari Kartu Prakerja.⁷⁷ Dari jawaban ini, dapat dilihat bahwa materi yang diberikan pada program Kartu Prakerja bisa memberikan efek atau dampak yang baik bagi penggunaanya, dan salah satu responden peneliti, Hamzah, mengharapkan

⁷⁶ Ryan Puspa Bangsa, "Jokowi: Kartu Prakerja Terbukti Tingkatkan Keterampilan," *Gatra.com*, 17 Maret 2021, diakses 22 April 2021, <https://www.gatra.com/detail/news/506469/ekonomi/jokowi-kartu-prakerja-terbukti-tingkatkan-keterampilan#:~:text=Jakarta%2C%20Gatra.com%2D%20Presiden,program%20Kartu%20Prakerja%20meningkatkan%20keterampilan.&text=Peserta%20program%20Kartu%20Prakerja%20dipersilakan,diminati%20untuk%20dapat%20meningkatkan%20kemampuan.>

⁷⁷ Ilma, Wawancara (Malang, 4 April 2021)

bahwa Kartu Prakerja ini bisa diadakan secara *offline* karena secara *online* saja sudah baik, apalagi jika pelatihan ini juga dilakukan secara *offline*.⁷⁸

Adapun yang ketiga dari tujuan program ini adalah pengembangan kewirausahaan, pengembangan ini diberikan kepada mereka yang ingin membuka usaha dan mereka yang sudah membuka usaha mikro dan kecil yang ingin mengembangkan usaha mereka. Sehingga, diharapkan program ini juga tidak hanya mengembangkan kemampuan masyarakat Indonesia untuk siap di lapangan pekerjaan, tetapi juga siap untuk bisa menjadi wirausahawan, karena dengan adanya wirausaha di Indonesia akan menjadikan Indonesia memiliki kemajuan perekonomian dan memperbaiki situasi perekonomian di Indonesia, karena dengan adanya mereka yang berwirausaha akan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga meluaskan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia yang mana akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan pendapatan.

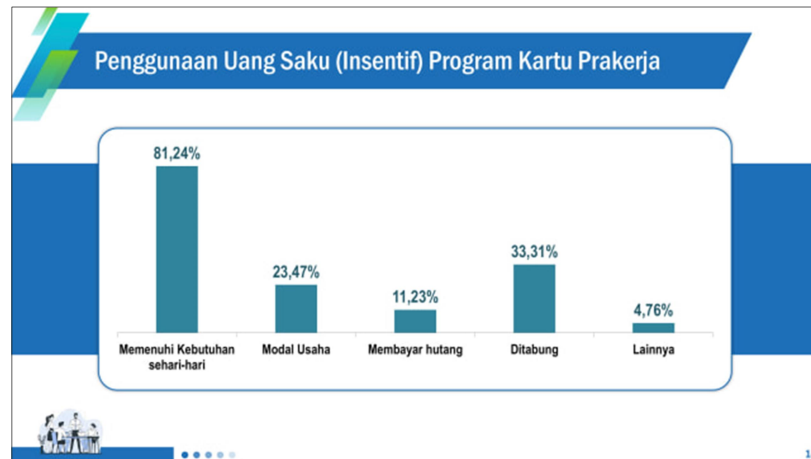
Manurut survei Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja atau PMO menyatakan bahwa 387.234 alumni program ini, menjadi wirausaha, yang mana mereka semula adalah pengangguran.⁷⁹ Ini merupakan sebuah pencapaian yang baik, karena pelaksanaan program akan mulai sesuai dengan

⁷⁸ Hamzah, Wawancara (Malang, 28 Maret 2021)

⁷⁹ CNN Indonesia, "Survei PMO: 387.234 Alumni Kartu Prakerja Jadi 'Pengusaha'," *CNN Indonesia*, 8 April 2021, diakses 21 April 2021, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210408171810-532-627597/survei-pmo-387234-alumni-kartu-prakerja-jadi-pengusaha>

tujuan dilaksanakannya program ini. Adanya pernyataan tentang alumni pelatihan yang menjadi wirausaha ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

3.2 Badan Pusat Statistik



Pada gambar di atas, terlihat 23,47% alumni peserta pelatihan kartu prakerja menggunakan dana insentif untuk modal usaha, yang berarti mereka akan menggunakan dana ini untuk berwirausaha, bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini juga secara bebas digunakan, baik untuk mencari pekerjaan, memenuhi kebutuhan hidup atau digunakan sebagai modal usaha dan yang lainnya.⁸⁰

Hal ini juga dinyatakan oleh Marta Ilma bahwa dana insentif yang diberikan oleh pemerintah ini akan digunakan untuk membuka usaha *online*.⁸¹

Begitu juga bagi mereka yang belum lolos pada Kartu Prakerja ini, mereka

⁸⁰ Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja

⁸¹ Ilma, wawancara (4 April 2021)

juga berharap nantinya akan mengikuti pelatihan dibidang tataboga dan jualan online yang mana dari sini juga sudah bisa dilihat bahwa sebagian besar minat mengikuti program Kartu Prakerja ini adalah untuk membuka usaha.⁸²

Namun, jika dikaitkan dengan tujuan awal pembuatan program ini, seharusnya penggunaan dana insentif mayoritas lebih bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup harian dan modal usaha, namun pada diagram di atas dapat di lihat bahwa dana insentif ini akan ditabung dan dapat diartikan bahwa mereka memiliki keuangan yang cukup, sehingga dana insentif ini hanya dipergunakan untuk dana sampingan atau tabungan. Padahal, Kartu Prakerja ini diperuntukkan bagi mereka yang terdampak COVID-19, membutuhkan untuk mencari pekerjaan dan membuka usaha.

Program Pelatihan Kartu Prakerja, merupakan salah satu sarana untuk bisa memantau perkembangan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh platform-platform yang bergabung dengan program ini, akan membantu masyarakat untuk mendapatkan materi dan bimbingan untuk bisa mengembangkan bakat dan minat yang ada pada masyarakat, juga dapat menciptakan manusia yang terampil, percaya diri dan tidak bergantung dengan orang lain.

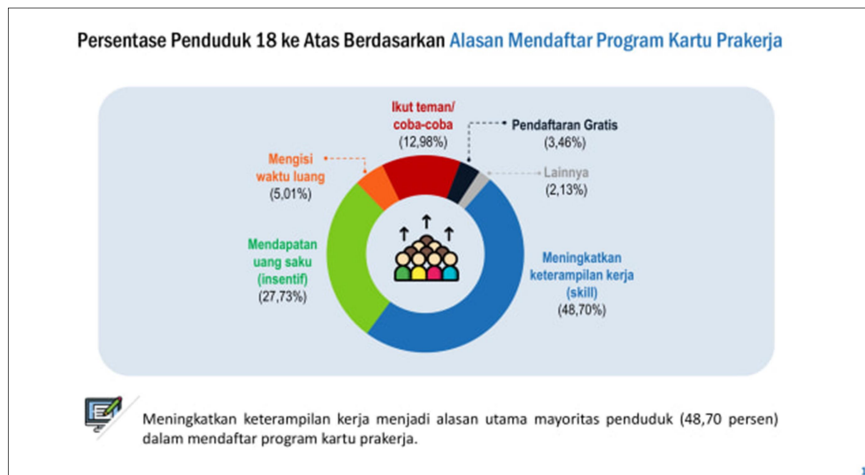
Sehingga, seluruh masyarakat di Indonesia berhak untuk bisa mendapatkan pelatihan ini, namun memang lebih tepat lagi pemerintah memberikan batasan sementara ini hanya bagi mereka yang terdampak

⁸² Rina dan Resty, wawancara (31 Juli 2021)

COVID-19 dan mereka yang menganggur dan mencari kerja saja yang benar-benar diperbolehkan untuk bisa mengikuti program Pelatihan Kartu Prakerja ini. Program pelatihan ini, dilaksanakan secara daring karena pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia, walaupun memang rencana awalnya program ini dilaksanakan secara tatap muka, namun situasi yang tidak mendukung mengakibatkan pelatihan ini dilakukan secara *online*.

Pelatihan Kartu Prakerja sangat banyak diminati oleh masyarakat, karena selain mendapatkan ilmu untuk bisa meningkatkan *skill*, dana insentif kartu prakerja juga cukup menjanjikan bagi masyarakat, karena menurut badan pusat statistik dalam surveinya, 27% alumni penerima program ini mengatakan bahwa alasan mengikuti program ini karena adanya dana insentif yang diberikan, nominal yang cukup besar dapat membuat masyarakat tertarik untuk mengikuti program kartu prakerja ini, karena dana tidak hanya diberikan seussai mengikuti pelatihan, akan tetapi pada saat pelatihannyapun masyarakat juga diberikan bantuan sebesar Rp 1.000.000,00 agar benar-benar bisa dimanfaatkan untuk membeli pelatihan yang disediakan, selain itu survei juga mendapatkan hasil 48% dari mereka yang mengikuti program ini karena ingin meningkatkan potensi dan keahlian yang mereka miliki. Adapun bukti diagram presentasinya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.3 Badan Pusat Statistik



Dari diagram di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat yang ingin meningkatkan kompetensi pada dirinya cukup banyak dan menjadi mayoritas pada presentase ini, namun masih disayangkan juga masih saja masyarakat yang memanfaatkan program ini hanya karena mengikuti teman dan coba-coba, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang benar-benar membutuhkan program ini, baik untuk meningkatkan kualitasnya atau untuk mengembangkan potensi dan keyakinan dirinya untuk bisa menjadi wirausahawan.

Salah satu masyarakat dari Kota Palembang sebagai narasumber menyatakan bahwa :

“Ikut pendaftaran dari gelombang pertama, kalau aku suami saya dari gelombang 10 tapi belum pernah lolos, kami juga tidak pernah menerima bantuan apapun, padahal butuh banget di kondisi saat ini. Kalau saya kemarin jualan online tetapi sekarang sudah tidak karena untuk modal sudah termakan biaya sehari-hari, jadi sekarang hanya menunggu orderan jasa

kurir, karena suami sudah dua minggu berhenti bekerja, padahal baru saja diterima bekerja sekitar satu bulan, apalagi sekarang mencari pekerjaan juga sulit dan untuk jualan terkadang juga tidak ada untung dan cukup bersyukur jika ada yang beli.”⁸³

Resty dan suami, salah satu pejuang program Kartu Prakerja yang kondisi perekonomiannya sangat menurun karena pandemi COVID-19, ia menyatakan bahwa program ini sangat dibutuhkan oleh dia dan keluarga, namun ternyata tidak cukup satu atau dua kali melakukan pendaftaran, bahkan lebih dari sepuluh kali melakukan pendaftaran masih bisa dinyatakan tidak lolos dan tidak terdapat alasan yang pasti penyebab ketidaklolosan pada program ini.

Hal ini menunjukkan bahwa proses pendaftaran dari program Kartu Prakerja masih perlu diawasi dan diseleksi lebih detail. Salah satu narasumber yang menerima program ini, masih memiliki kondisi perekonomian yang sangat memadai dan tidak terdampak COVID-19, namun ia turut ikut program Kartu Prakerja untuk insentif. Jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi Resty atau narasumber yang tidak lolos ini, ia masih jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi Resty dan keluarga yang harus memutar pikiran agar bisa terhidupi keluarganya.

Sumber daya manusia di Indonesia, masih sering tidak dimanfaatkan secara optimal, terbukti dengan tingkat pengangguran yang tinggi di

⁸³ Resty, wawancara (31 Juli 2021)

Indonesia, jumlah penduduk Indonesia yang makin lama makin meningkat membuat jumlah angkatan kerja juga kian lama kian meningkat, jika tidak diimbangi dengan pendidikan dan pelatihan yang maksimal, persaingan untuk bisa berkompetisi dengan negara lain untuk bisa memajukan negara akan semakin tertinggal, karena dengan adanya pelatihan inilah masyarakat akan terasah kemampuannya, disamping itu banyaknya penduduk yang minim penghasilannya menjadikan program ini diminati karena terdapat dana insentif yang didapatkan, tepat jika pemerintah memberikan dua kelebihan dari program ini, yakni mendapatkan pelatihan dan insentif, karena insentif inilah yang juga akan menjadikan banyak masyarakat berbondong-bondong untuk bisa memanfaatkan program pelatihan ini.

Dari beberapa alumni penerima program yang sempat diwawancarai oleh peneliti, mereka menyatakan bahwa mengikuti program ini membutuhkan kesabaran untuk bisa lolos ini karena banyaknya peminat yang mana mereka harus melakukan beberapa kali pendaftaran baru bisa lolos program Kartu Prakerja, tidak hanya satu kali atau dua kali kegagalan yang mereka dapatkan, namun bisa sampai enam kali pendaftaran.⁸⁴ Bahkan, dari beberapa komentar pada akun sosial media Kartu Prakerja ada yang menyatakan bahwa dari awal pembukaan pendaftaran program hingga gelombang tiga belas belum dapat lolos sama sekali, yang mana ia juga

⁸⁴ Hamzah, wawancara (28 Maret 2021).

menyatakan bahwa program ini sangat ia butuhkan karena ingin bisa meningkatkan keahlian juga mendapatkan dana insentif untuk menambah biaya hidup.

Sebelum adanya perubahan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 ini, banyak pegawai-pegawai yang ikut mendaftar program ini dan lolos, sehingga diawal pembukaan pendaftaran banyak peserta yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah, hal ini diketahui dari berita online dan juga pengakuan dari beberapa pegawai DISNAKER di Kabupaten Malang, karena pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tidak terdapat pengecualian terkait pendaftar program kartu prakerja. Pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja menjelaskan bahwa program kartu prakerja ini tidak diperkenan diberikan kepada pejabat-pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, aparatur sipil negara, TNI, anggota kepolisian RI, kepala desa dan perangkatnya, direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN dan BUMD.⁸⁵ Dengan adanya penambahan ayat pada peraturan presiden ini, pendaftar program pelatihan ini lebih terfokus pada masyarakat lain namun belum benar-benar terfokus pada yang benar-benar membutuhkan.

⁸⁵ Perpres Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja

Walaupun program ini ditujukan kepada angkatan kerja, namun tidak semua usia angkatan kerja diperbolehkan mengikuti program ini, adapun persyaratannya yakni :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Minimal usia 18 tahun.
3. Tidak sedang mengikuti sekolah formal.

Bagi mereka yang masih kuliah, SMK atau SMA tidak diperkenankan untuk mengikuti program Kartu Prakerja karena program pelatihan ini bukan pengganti dari sekolah formal. Hingga gelombang 14 ini, Kartu Prakerja sudah dirasakan oleh 1,8 juta orang dengan target 2,7 juta orang pada semester pertama di tahun 2021, hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto.⁸⁶ Adapun hingga pendaftaran gelombang 14 ini terdapat 556 juta orang melakukan pendaftaran pada program kartu prakerja ini dengan 17 platform digital yang mendukung dan 1.700 pelatihan yang bisa dipilih oleh peserta.

Pada pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 menjelaskan tentang pelatihan yang akan diberikan kepada peserta merupakan pelatihan yang di dalamnya terdapat unsur terkait pembekalan dan

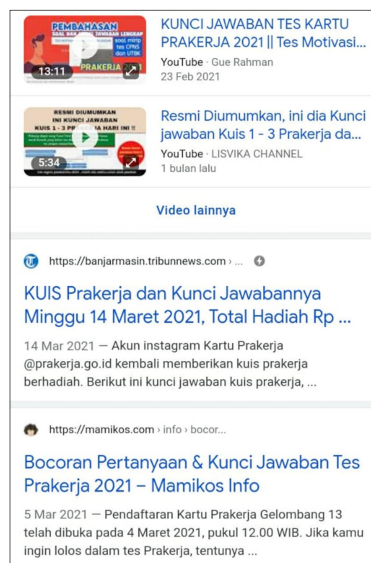
⁸⁶ Anggun P. Situmorang, "Realisasi Anggaran Kartu Prakerja di 2021 Capai Rp 4,26 Triliun hingga 13 Maret," *Liputan 6*, 18 Maret 2021, diakses 22 April 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4509497/realisasi-anggaran-kartu-prakerja-di-2021-capai-rp-426-triliun-hingga-13-maret#>

peningkatan kompetensi kerja dan kewirausahaan juga untuk alih kompetensi kerja.⁸⁷ Terdapat 1.700 pelatihan yang terdapat pada Kartu Prakerja yang mana ini merupakan pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat, untuk pembekalan kompetensi kerja peserta dapat memilih antara lain seperti keterampilan resepsionis, *microsoft office* untuk administrasi perkantoran, mempersiapkan diri mendapatkan pekerjaan impian, kemudian untuk kewirausahaan SISNAKER menyediakan pelatihan antara lain terkait dengan *copywriter*, *facebook ads strategy*, berpenghasilan dari internet. Untuk alih kompetensi kerja, tergantung dari kebutuhan peserta berkeinginan untuk mencari pekerjaan atau memulai wirausaha. Pelatihan kartu prakerja di dalamnya terdapat pelatihan yang hanya berupa video sampai pelatihan yang berbentuk webinar sehingga terdapat host dan pembicara yang ahli pada bidang pelatihan tersebut. Adapun pelatihan ini juga ada dengan harga yang relatif murah dan harga yang mahal, dari beberapa peserta yang dapat diwawancarai menyatakan bahwa pelatihan dengan harga yang terjangkau memberikan fasilitas pelatihan berupa video materi yang bisa diulang selama peserta tidak memahaminya, tidak bisa melakukan tanya jawab dengan pemateri karena hanya berupa video tanpa ada interaksi dan setelah mengikuti pelatihan akan ada kuis untuk melihat kesungguhan peserta dalam mengikuti pelatihan dan terdapat pengulangan kuis bagi mereka yang tidak lolos dengan

⁸⁷ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

program ini. Untuk ujian atau kuis yang diadakan sesuai pelatihan, memiliki tujuan untuk melihat seberapa efektif pelatihan yang dijalani, namun nyatanya banyak peserta yang mencari kunci jawaban di internet sehingga kuis yang seharusnya menjadi patokan keefektifan program ini menjadi kurang pas karena banyak dari peserta mencari kunci jawaban di internet. Tidak hanya kunci jawaban kuis, kunci jawaban tes pendaftaran kartu prakerja juga terdapat di google dan youtube yang mana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

3.5 Google



Bahkan, tidak hanya kunci jawaban adanya calo atau joki untuk mengerjakan pendaftaran pelatihan agar lolos juga ada, baik membayar atau tidak dan bahkan secara terang-terangan terdapat di salah satu akun sosial

media Tiktok yang menjelaskan bahwa ia bisa meloloskan para calon peserta program.

Untuk mendapatkan pelatihan dengan harga yang murah, peserta bisa membeli seharga Rp 70.000,00 saja, adapun pelatihan ini ada pada platform sekolah.mu, sedangkan di Sistem Informasi Ketenagakerjaan peserta harus membeli pelatihan minimal Rp 85.312 untuk mendapatkan pelatihan dengan harga termurah.

Sedangkan untuk pelatihan dengan harga yang relatif mahal, memberikan fasilitas berupa video pelatihan dan webinar yang menjelaskan terkait materi pelatihan, setelah itu terdapat sesi tanya jawab dengan pemateri dan juga kuis usai pelatihan untuk melihat kesungguhan peserta mengikuti pelatihan, adapun alumni juga mengatakan bahwa kuis ini hanya sekedar formalitas untuk kelengkapan tahap penyelesaian pelatihan.⁸⁸ Namun, dari *creator youtube* yakni Calon Guru (Kanjeng Mariyadi Ngawi), yang mana ia merupakan peserta Kartu Prakerja mengatakan bahwa sertifikat pelatihan bisa didapatkan apabila bisa menyelesaikan kuis dengan nilai yang memuaskan, apabila mendapatkan nilai yang kurang memuaskan atau yang menyebabkan tidak lulus, akan membuat sertifikat pelatihan sulit untuk dikeluarkan. Selain itu, Ilma juga mengatakan bahwa untuk nilai kuis harus sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, jika poin terlalu kecil maka harus diulang hingga bisa

⁸⁸ Hamzah, wawancara (28 Maret 2021).

mendapatkan poin yang memuaskan. Pada platform SISNAKER, sertifikat pelatihan akan dapat diterima apabila peserta mengikuti webinar yang sudah dijadwalkan, apabila tidak mengikuti webinar maka sertifikat juga tidak bisa diterima oleh peserta karena tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, adapun biaya pelatihan terbesar yang disediakan oleh SISNAKER senilai Rp 1.000.000,00 yang mana nilai ini sesuai dengan total bantuan biaya pelatihan.

Pelatihan Kartu Prakerja yang dilaksanakan di SISNAKER dilaksanakan dengan online secara keseluruhan dan sesuai dengan pasal 5 ayat (3). Untuk bisa mengikuti pelatihan Kartu Prakerja di KEMNAKER, maka peserta harus melakukan beberapa langkah yakni :

1. Melakukan pendaftaran di account.kemnaker.go.id.
2. Memilih pelatihan dengan tanda Kartu Prakerja di KEMNAKER dan dapat dibayar dengan saldo yang ada, dan pastikan bahwa sudah terdapat nomor kartu peserta sebanyak 16 digit dan biaya pelatihan sebesar Rp 1.000.000,00.
3. Mengikuti pelatihan yang sudah dibeli.
4. Memberikan ulasan dan rating pada lembaga pelatihan terkhusus pada pelatihan yang diikuti.

5. Mengisi survei sebagai bentuk penilaian terhadap keefektifan program.⁸⁹

Setelah mengikuti pelatihan, peserta berhak untuk mendapatkan insentif yang sudah dijanjikan, insentif ini diberikan jika peserta telah menggunakan biaya pelatihan dan mengikuti pelatihan walaupun hanya satu kali dan peserta masih bisa mengikuti pelatihan setelah mendapatkan insentif. Pada gelombang 17 pendaftaran kartu prakerja ini, akan dibuka bersamaan dengan rencana pencabutan kepesertaan Kartu Prakerja mulai gelombang 12-14 dan berlaku juga untuk gelombang 15 yang masanya akan hangus pada 23 Maret 2021 jika tidak sesegera mungkin menggunakan bantuan biaya pelatihannya, banyaknya peserta yang tidak melakukan pembelian pertama membuat masyarakat geram akan hal ini, karena masih banyak masyarakat yang lebih mendesak untuk mengikuti program ini baik untuk peningkatan potensi atau insentifnya karena sayang jika kuota yang diberikan jatuh kepada orang yang salah dan hanya menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diterimanya.

Penindakan seperti ini memang seharusnya dilaksanakan agar tidak terjadi penyalahgunaan kesempatan pada pelatihan ini, karena sangat disayangkan jika kesempatan besar ini dilewatkan begitu saja, terlebih lagi untuk bisa mengikuti program ini butuh usaha dan kesabaran karena belum tentu dalam satu kali kesempatan bisa lolos untuk menjadi peserta pelatihan.

⁸⁹ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, <https://pelatihan.kemnaker.go.id/prakerja>

Terkait dengan pencabutan kepesertaan, peraturan presiden yang terkait tidak mengatur tentang hal ini, pencabutan ini tercantum pada pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja dan dijelaskan lebih detail di ayat (4) terkait pencabutan ini bahwa bantuan pelatihan, dana insentif yang di dapatkan akan dikembalikan ke Rekening Dana Kartu Prakerja dan tidak diperkenankan kembali untuk mengikuti pelatihan.⁹⁰

Pelaksanaan program pelatihan secara daring ini merupakan salah satu wujud pemerintah untuk berjalan mengikuti arus teknologi yang sedang berkembang di seluruh dunia, karena semakin lama maka teknologi juga akan semakin berkembang dengan canggih dan pesat. Pendaftaran Kartu Prakerja melalui online terdapat banyak dampak positif seperti memulainya kebijakan pemerintah dengan kemajuan teknologi, mulai membiasakan kepada masyarakat Indonesia untuk ikut maju dengan berkembangnya teknologi

⁹⁰ Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

nambun dibalik dampak positif ini, terdapat dampak negatif yang memungkinkan program ini menjadi kurang berjalan sesuai sasarannya, ditinjau dari banyaknya pendaftaran yang dilakukan oleh masyarakat perkotaan dengan presentase sebesar 76%, membuat masyarakat pedesaan hanya bertempat di presentasi 24% saja, hal ini di dapat dari survei BPS 2020 lalu, dan berikut gambar mengenai presentasenya.

Gambar 3.4 Badan Pusat Statistik



Pada diagram di atas, terlihat bahwa mayoritas penerima program Kartu Prakerja bertempat tinggal di perkotaan hal ini karena akses sinyal yang cukup sulit di wilayah pedesaan, adapun peserta Kartu Prakerja yang berasal dari pedesaan, Septa Amalia menyatakan bahwa susahnya sinyal menjadi hambatan untuk mengikuti setiap pelatihan karena untuk mengikuti satu pelatihan, peserta harus pergi ke kota atau ke gunung untuk bisa mendapatkan

sinyal yang baik.⁹¹ Program pelatihan yang dirancang secara daring sebaiknya juga terdapat solusi bagi masyarakat yang susah sinyal seperti pada wilayah pedesaan, terlebih lagi desa merupakan tempat yang cukup kurang akan pendidikan dan pelatihan untuk bisa meningkatkan kompetensi, karena masyarakatnya lebih nyaman untuk berada di zona nyamannya untuk beraktivitas dalam mencari pangannya. Bahkan juga mempengaruhi keturunannya untuk tidak perlu berpendidikan tinggi karena beranggapan bahwa pendidikan tinggi tidak akan menjamin kehidupan mereka kelak dan pada akhirnya mereka juga akan mengurus ladang orang tuanya.⁹²

Padahal seharusnya program kartu prakerja ini juga harus dimaksimalkan bagi masyarakat desa yang kurang akan pengembangan kompetensinya, penyebaran terkait informasi program kartu prakerja hendaknya lebih ditingkatkan agar setiap masyarakat di Indonesia bisa mengetahui manfaat yang ia dapat selama mengikuti program ini. Adapun jika dilihat kembali tujuan dari pembuatan program pelatihan, sayang sekali jika insentif diberikan hanya dengan persyaratan mengikuti satu kali pelatihan saja, walaupun program ini merupakan bagian dari bantuan sosial, dana yang dipakai dengan satu kali pelatihan juga tidak bisa menghabiskan dana bantuan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah, terkecuali jika membeli dengan harga maksimal yakni Rp1.000.000,00, terlebih lagi masyarakat akan memilih

⁹¹ Septa Amalia, wawancara (28 Maret 2021).

⁹² Ardika Fateh Hukama, "Persepsi Masyarakat Pedesaan Terhadap Pendidikan Tinggi (Studi Analisis Teori George Herbert Mead)," *JPIPS*, No.1 (2017): 4 <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jpips>

pelatihan yang murah tanpa ada webinar karena dengan tidak adanya webinar akan membuat peserta bermalas-malasan untuk mengikuti program pelatihan yang ia jalankan, seperti yang sudah saya wawancarai dari dua peserta pelatihan yang mana mereka menyatakan bahwa pelatihan yang mereka lakukan hanya sekedar formalitas, karena hanya berupa video materi yang tidak ada interaksi dengan pihak pemateri, dan video bisa saja hanya diputar tanpa ada pemahaman dan perhatian lebih terhadap video yang menjelaskan tentang pelatihan tersebut. Namun, jika terdapat webinar di semua pelatihan, maka peserta akan lebih giat dan berusaha untuk bisa mengikuti pelatihan karena webinar yang dilaksanakan sudah terjadwal dan terstruktur di setiap platform pelatihannya. Sehingga tujuan awal untuk bisa meningkatkan kompetensi masyarakat juga akan tercapai, karena dengan mengikuti beberapa pelatihan dan dengan adanya pemateri yang bisa melakukan diskusi bersama akan lebih efektif dibanding hanya video saja dan nantinya peserta juga tidak hanya terpaku pada dana insentif yang diberikan oleh pemerintah.

Dari beberapa peserta yang sudah diwawancarai, memang pada awalnya sedang menganggur dan ingin mengikuti pelatihan, namun mengetahui pelatihan hanya berupa video membuat rasa malas muncul karena seakan-akan pada pelatihan tersebut tidak ada kewajiban untuk bisa benar-benar memperhatikan pelatihan ini. Tidak hanya itu, adapula yang sedari awal sudah memang berniat untuk mencari insentifnya saja tanpa memperhatikan

manfaat pelatihan yang didapat, hal ini mereka lakukan dengan mengikuti pelatihan yang murah sehingga pelatihan itu dilakukan tanpa ada webinar. Adapun terkait dengan insentif, dalam pasal 26 Permenko Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 menjelaskan bahwa insentif akan diberikan bagi peserta yang sudah mendapatkan sertifikat pelatihan pertamanya dan memberikan ulasan dan rating pada pelatihan yang sudah dilakukan. Sedangkan, untuk mendapatkan sertifikat peserta hanya diperlukan untuk mengikuti pelatihan dan lulus ujian, mengikuti pelatihan jika tidak disertai dengan adanya bimbingan secara langsung atau webinar, akan membuat sebagian masyarakat tidak terlalu giat dan sungguh-sungguh mengikuti pelatihan yang dipilihnya.

C. Analisis Pembagian dan Pelatihan Kartu Prakerja Perspektif *Mashlahah mursalah*

Program Pelatihan Kartu Prakerja merupakan pelatihan yang diciptakan untuk bisa menarik manfaat yakni mewujudkan masyarakat yang siap berkompetisi untuk meningkatkan kemampuan mereka dan memperkecil mafsadat yakni pengangguran, kurang siapnya angkatan kerja memasuki dunia kerja, rendahnya jiwa kewirausahaan karena kewirausahaan di Indonesia hanya pada angka 3,47% yang mana angka ini berada di bawah negara tetangga yakni Thailand sekitar 4,26% dan Malaysia 4,74% juga Singapura 8,76%, padahal warga negara Indonesia memiliki jumlah yang

banyak, sehingga dengan angka 3,47% hanya sebagian kecil saja.⁹³ Pelatihan Kartu Prakerja juga merupakan bantuan sosial untuk menanggulangi dampak COVID-19 dan Program yang dibentuk untuk kepentingan masyarakat umum yang merupakan bentuk dari perwujudan kebijakan pemerintah yang didasarkan pada *mashlahah mursalah*, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemashlahatan”

Dari kaidah fiqhiyyah ini dapat diketahui bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus di dasarkan oleh kemashlahatan umum, bukan hanya kepentingan pribadi, pelaksanaan pelatihan ini memang tidak terdapat di dalam nash Al-Qur'an maupun hadits, namun dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja yang mendasari peluncuran pelatihan Kartu Prakerja merupakan bentuk pemerintah untuk mengontrol dan memberikan batasan terhadap pelaksanaan pelatihan ini, juga diharapkan dengan adanya peraturan ini program menjadi lebih terstruktur agar tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang telah dibuat.

⁹³ Anonim, “BRIncubator 2021, Ajang UMKM Kuliner Menuju Pasar Global,” *CNBC Indonesia*, 20 April 2021, diakses 29 April 2021 <https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20210420114405-25-239199/brincubator-2021-ajang-umkm-kuliner-menuju-pasar-global>

Pelatihan ini sengaja diluncurkan pada saat pandemi diimbangi dengan dana insentif untuk mengurangi beban biaya hidup masyarakat penerima manfaat pelatihan, namun pelaksanaan kartu prakerja memang tidak ada jaminan untuk mendapatkan pekerjaan, hal ini dinyatakan pada hasil tanya jawab dengan kementerian ketenagakerjaan. Karena program ini memang lebih memfokuskan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan membantu dalam hal finansial untuk biaya saat mencari kerja.

Imam Al- Ghazali merupakan ulama besar madzhab Syafi'i yang menjelaskan secara detail terkait dengan *mashlahah mursalah*, beliau adalah tokoh dengan kelahiran tahun 450 H/1058 M di desa Ghazlah Thabran kota Thus di Khurasan Iran, pemikiran beliau menjadi sejarah besar dalam filsafat Islam juga dunia, karena beliau memiliki pengetahuan yang sangat luas.⁹⁴ Disebut ulama yang handal karena banyaknya karya yang beliau buat dan menguasai banyak cabang ilmu.

Dalam menerapkan *mashlahah mursalah* Imam Al-Ghazali memberikan syarat keberlakuannya agar segala sesuatu yang ditetapkan oleh manusia bisa memberikan manfaat yang sesuai dengan nash dan tidak hanya nafsu belaka dan hal ini akan dikaitkan dengan Kartu Prakerja yang sedang berjalan sekarang.

⁹⁴ Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali," 121.

Dalam mashlahah, ketetapanannya harus sesuai dan berkaitan dengan lima tujuan syariat yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁹⁵ Kartu prakerja ini sejalan dengan syara', sesuai dengan tujuan syariat Islam yang ketetapanannya harus merujuk untuk menjaga salah satu dari lima pokok utama prinsip kehidupan dan program ini. Pelatihan Kartu Prakerja dalam mashlahah ini berkaitan dengan menjaga harta, karena pelaksanaannya ditujukan agar masyarakat dapat lebih percaya diri untuk mencari pekerjaan, karena dengan bekerja seseorang dapat menghidupi keluarga ataupun dirinya sendiri untuk memenuhi sandang, pangan dan papan, selain itu juga terdapat pemberian dana insentif yang bisa digunakan untuk kebutuhan hidup harian dan biaya mencari kerja. Pelaksanaan pelatihan ini juga berkaitan dengan menjaga akal, yang mana bisa dilihat dari program pelatihan yang diberikan, dari pelatihan ini membuat seseorang menjadi belajar, adapun belajar disini juga termasuk ke dalam memelihara akal karena dengan belajar seseorang akan mendapatkan ilmu dan menghindarkan manusia dari kebodohan. Pelatihan ini dibuat agar masyarakat lebih bisa mengasah segala kemampuan yang ada pada dirinya sehingga siap untuk masuk ke dunia kerja.

Kartu Prakerja ini juga tidak bertentangan dengan nash, sesuai dengan paparan di atas bahwa program ini secara tidak langsung telah didukung dengan nash Al-Qur'an dan hadits. Dalam Qur'an Surat Ali-Imran ayat 104, Allah SWT berfirman :

⁹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 371.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.

Dalam surat ini, Allah memerintahkan sebagian umat untuk memerintahkan kepada orang lain untuk berbuat kebaikan dan melarang untuk berbuat hal-hal yang buruk. Hal ini dilakukan oleh pemerintah, yakni dengan adanya program Kartu Prakerja, pemerintah mengharapkan agar rakyatnya tidak hanya sekedar menganggur di rumah, akan tetapi mereka diharapkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang sudah disediakan pada setiap platform yang mendukung program Kartu Prakerja, program pelatihan yang dibuat oleh pemerintah ini menjadikan masyarakat untuk kembali belajar, mengasah kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan yang dimiliki juga mencari kemampuan apa yang sebenarnya mereka minati, dengan pelatihan ini masyarakat juga akan terhindar dari kekurangan pemahaman terkait potensi yang dimiliki. Program ini merupakan bantuan sosial yang tidak serta merta memberikan dana bantuan kepada masyarakat, akan tetapi ini merupakan bantuan sosial bersyarat yang tujuannya untuk memerintahkan masyarakatnya menggali dan mengasah potensi dirinya melalui pelatihan yang disediakan. Karena dengan pelatihan akan membuat

wawasan masyarakat bertambah untuk menemukan atau meningkatkan potensinya, baik untuk menjadi karyawan yang berkompeten, menjadi calon wirausaha yang sukses, dan siap untuk mencari dan masuk ke dunia kerja.

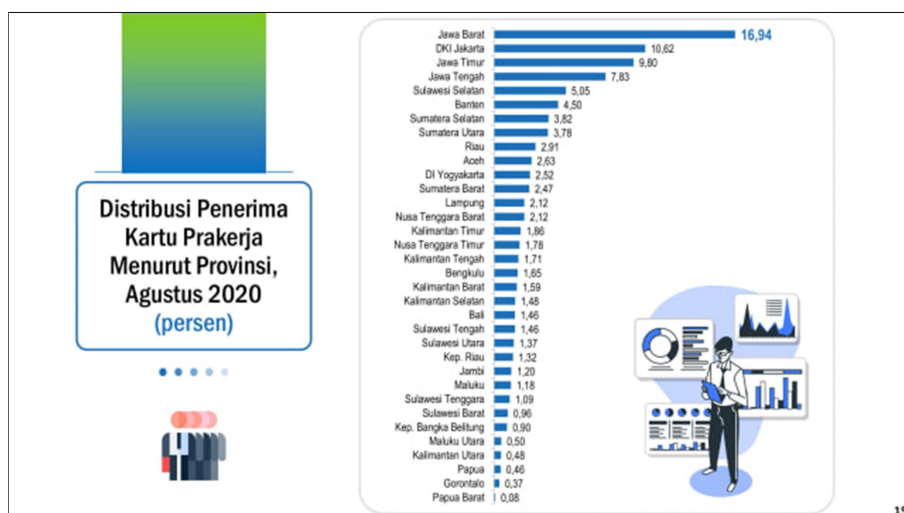
Program pelatihan pemerintah ini dibuat oleh pemerintah demi rakyatnya yang membutuhkan program ini baik untuk pelatihannya atau dana insentifnya, karena tidak dipungkiri pendaftar kartu prakerja juga tidak sedikit yang berkeinginan untuk mendapatkan insentifnya dibanding manfaat pelatihannya, pelatihan yang tidak terdapat di dalam nash Al-Qur'an maupun hadits secara khusus ini baik untuk menolak atau menerimanya, namun secara kemaslahatan program ini memberikan banyak manfaat bagi pendaftarnya, karena 88,9% dari alumni Kartu Prakerja data BPS menyatakan bahwa program ini bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi atau keterampilan yang mereka miliki. Di dalam kaidah fiqh di atas yang membahas tentang kebijakan seorang pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan, menjelaskan bahwa dalam mengambil suatu kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan secara umum yakni kemaslahatan rakyat-rakyatnya, pemerintah tidak diharapkan untuk mewujudkan suatu kebijakan yang hanya berdasarkan satu pertimbangan saja, karena masih ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat yang lebih baik atau lebih banyak dibanding manfaat yang sedang diperkirakan.

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Artinya:” Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat” Q.S. Al-An’am ayat 152.

Dalam ayat ini memang dijelaskan tentang harta anak yatim, namun jika kita telaah lebih lanjut ayat ini juga membahas secara eksplisit terkait pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya, yang terwujud dalam program Kartu Prakerja ini. Adanya Kartu Prakerja yang dibuat oleh pemerintah yang merupakan bantuan untuk mengatasi pandemi, untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa posisi seorang pemerintah menjadi seperti wali yatim yang mengayomi rakyatnya. Adapun penyebaran kartu prakerja tersebar mulai provinsi Jawa Barat sebagai penerima program terbanyak dan paling sedikit di Papua, walaupun jumlah penerima berjarak sangat jauh, namun setidaknya program ini sudah dirasakan oleh sebagian masyarakat di Papua. Adapun presentase penerima Kartu Prakerja dapat dilihat pada diagram dibawah ini.

Gambar 3.6 Badan Pusat Statistik



Salah satu narasumber yang berasal dari Palembang, Resty menyatakan bahwa sudah lebih dari sepuluh kali mengikuti pendaftaran dengan dua akun yang berbeda, yang mana satu akun lainnya sudah tujuh kali mengikuti pendaftaran namun keduanya masih belum kunjung diberi kesempatan untuk bisa lolos pada program ini.⁹⁶ Sedangkan narasumber yang berasal dari Jawa Barat, Ayang Sity dengan latar belakang perekonomian yang tidak terdampak COVID-19 dan alasan mengikuti program ini hanya untuk coba-coba bisa lolos dengan satu kali melakukan pendaftaran saja.⁹⁷

Wilayah di luar pulau Jawa juga harus tetap diperhatikan dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja ini. Karena, masyarakat Indonesia yang berada di luar pulau Jawa dan terdampak COVID-19 harus bisa mendapatkan program ini demi kemaslahatan yang ditimbulkan dari program ini.

Dalam pelaksanaannya, Kartu Prakerja tidak ada nash yang secara khusus membahas tentang program ini, melainkan nash yang secara umum berkaitan dengan program ini. Yang mana terdapat dalam Q.S. Al-An'am ayat 152 dan Ali Imran ayat 104, selain itu juga terdapat dalam hadits nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ibn Majjah

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

⁹⁶ Resty, wawancara (31 Juli 2021)

⁹⁷ Ayang Sity, wawancara (28 Maret 2021)

“Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat mudharat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mudharat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)”

Hadits ini diterapkan dalam pembuatan program Kartu Prakerja yang mana pemerintah tidak memberikan kebijakan semena-mena kepada rakyatnya yang terlihat pada pembuatan Kartu Prakerja dirancang untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dana bantuan, sesuai dengan *mashlahah mursalah* yang ditentukan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia secara umum dan program ini dirancang agar bisa mengurangi beban masyarakat memenuhi kebutuhan harian.

Mashlahah mursalah ini hanya berlaku sebatas pada muamalah saja, begitu juga dengan program Kartu Prakerja yang hanya sebatas hubungan manusia dengan manusia tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, yang mana program ini hanya sebatas program bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk masyarakatnya yang membutuhkan.

Pelatihan Kartu Prakerja yang sedang dilaksanakan ini merupakan kebutuhan hajiyyat yang mendekati dlaruriyat, karena pelatihan ini merupakan kebutuhan yang bisa memudahkan para penerima dampak COVID-19, tidak hanya memudahkan tetapi juga bisa menjadi yang diutamakan, yang mana

mereka mendapatkan biaya pelatihan yang menjadikan beban biaya pelatihan yang dikeluarkan berkurang dan akan sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang membutuhkan bimbingan untuk meningkatkan kompetensi, hal ini bisa dilihat bagi masyarakat yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja dari perusahaan tempat bekerja sebelumnya, yang mana untuk kembali menjadi pekerja di tempat lain juga merupakan hal yang cukup sulit, karena perusahaan akan berusaha untuk membatasi setiap pengeluaran, sehingga akan jarang perusahaan yang mencari dan menerima karyawan baru, maka dari itu untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup juga keluarganya mereka akan beralih menjadi wirausaha untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sampai pandemi COVID-19 berkurang, maka dari itu bagi mereka yang tidak memiliki potensi berwirausaha, pelatihan ini akan sangat dibutuhkan dan akan menjadi dlarurat karena keuangan yang mereka miliki di masa pandemi yang kurang, sehingga membutuhkan pelatihan gratis sekaligus meningkatkan jiwa kewirausahaan yang dimiliki. Karena seperti yang sudah terpapar di atas, sebanyak 23,47% alumni peserta pelatihan kartu prakerja menggunakan dana insentif untuk modal usaha yang menunjukkan program ini juga baik bagi mereka yang ingin membuka usaha. Selain itu, kemudahan lain juga diberikan dalam bentuk dana insentif selama empat bulan dan dana ulasan yang diberikan maksimal tiga kali yang mana akan memberikan kemudahan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi mereka yang mendapat pemasukan tetapi menurun akibat dampak COVI-19, bahkan jika masyarakat

yang tidak menerima pemasukan sama sekali akibat pandemi akan benar-benar membutuhkan bantuan ini dan menjadikannya bantuan utama dan bukan hanya sekedar memudahkan untuk memenuhi kebutuhan harian.

Bersifat kulli atau berlaku secara umum, sementara ini hanya berlaku bagi mayoritas penduduk Indonesia yang terdampak COVID-19 dan kebijakan ini juga semata-mata dibuat untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Kartu Prakerja merupakan mashlahah yang diberlakukan secara umum, tetapi hanya diperuntukkan bagi angkatan kerja yang berusia 18 tahun ke atas, tidak sedang bersekolah, terdampak pandemi COVID-19 dan tidak sedang menerima bantuan. Karena program ini juga tidak berlaku bagi mereka yang sudah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Program pelatihan yang diadakan karena pandemi, menjadikan program ini menjadi mashlahah yang berubah-ubah mengikuti perkembangan situasi dari waktu ke waktu, karena untuk saat ini Kartu Prakerja diperuntukkan bagi mereka yang terkena dampak COVID-19, yang mana awal pembuatan program ini ditujukan bagi angkatan kerja agar bisa lebih meningkatkan potensinya, daya saing, produktivitas juga jiwa kewirausahaan Rudy Salahuddin selaku Deputi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa program Kartu Prakerja sekarang menjadi semi bantuan sosial dengan pemberian bantuan Rp 1.000.000,00 untuk biaya pelatihan dan Rp 600.000

selama empat bulan sebagai biaya insentif bansos dan banyaknya biaya insentif yang diberikan saat ini lebih besar dibanding biaya insentif. Disaat vaksinasi sudah mulai berjalan lancar, program kartu prakerja akan dibuka pelatihan secara *offline* dan pelatihan benar-benar digunakan untuk peningkatan kompetensi bukan lagi semi-bansos, dan perubahannya akan dilakukan secara bertahap untuk dijadikan evaluasi.⁹⁸ Sehingga, Kartu Prakerja ini termasuk ke dalam mashlahah yang berubah-ubah dan bukan mashlahah yang tetap hingga akhir jaman.

Selain itu, pelaksanaan program sementara ini pemerintah mengadakan program ini untuk menanggulangi dampak COVID-19 yang sudah melanda di Indonesia, sehingga program ini dibuat untuk menarik kemashlahatan dan bukan untuk mencegah kerusakan karena permasalahannya sedang di alami oleh masyarakat Indonesia dan hal ini bertolak belakang dengan kaidah fiqh berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Mencegah kerusakan lebih utama daripada menarik kemashlahatan

Di samping manfaat yang diberikan oleh pemerintah, pemanfaatan program ini banyak digunakan oleh pekerja yang memiliki pendapatan

⁹⁸ Agnes Theodora, "Kartu Prakerja Akan Kembali ke Fungsi Awal," *Kompas*, 29 Maret 2021, diakses 23 April 2021 https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/03/29/kartu-prakerja-akan-kembali-ke-fungsi-awal/?status=sukses_login&status_login=login#

menengah, dan 14% penerima Kartu Prakerja masih berlatar belakang masyarakat yang berpendapatan tinggi. Begitu juga penyebaran kartu prakerja yang tidak merata juga harus mendapat perhatian lebih, karena lokasinya yang berada di luar pulau Jawa membuat pemerintah kurang memperhatikan dan memberikan arahan untuk pemerintah daerah setempat terkait program Kartu Prakerja.

Mashlahah harus qath'i, program ini dirancang untuk tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya yakni meningkatkan kompetensi kerja, namun untuk sementara ini menjadi semi-bansos untuk mengatasi perekonomian di Indonesia sehingga pemerintah berharap program ini bisa membuat masyarakat terbantu perekonomiannya berkat program ini dan dari data BPS juga menyebutkan bahwa 81,24% program ini dana insentifnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari namun pemerintah sudah memikirkan jangka panjang program ini dengan mengubah tujuan semi-bansos menjadi benar-benar untuk meningkatkan angkatan kerja bagi yang kehilangan pekerjaan dan berpendapatan kurang. Karena, jika mengacu pada program dengan tujuan kembali ke awal masyarakat masih terfokus pada insentif yang diberikan, bukan pada pelatihannya.

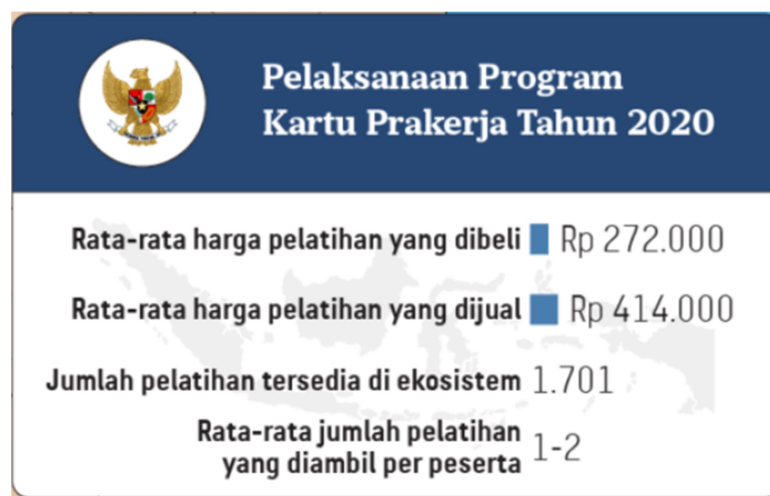
Kartu Prakerja yang sekarang yang lebih condong kepada semi-bansos karena pandemi, namun kelak jika pandemi mulai surut juga akan lebih baik jika Kartu Prakerja benar-benar diluncurkan untuk tujuan awal dibuatnya

program ini dan jika melihat kondisi di masa sekarang yang mana masyarakat juga lebih condong untuk membutuhkan dana insentifnya dibanding pelatihannya, jika memang program ini diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan pelatihan, maka program yang dirancang dengan satu kali pelatihan bisa langsung mendapatkan sertifikat yang mana hal ini kurang efektif jika dikaitkan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi, karena masyarakat juga tidak akan bisa mendapatkan keahlian hanya dengan satu kali pelatihan saja, sehingga jika memang program ini ditujukan untuk meningkatkan potensi, produktivitas dan daya saing angkatan kerja, pemerintah juga harus siap untuk mengubah prosedur pelaksanaannya agar tepat tujuannya dan manfaatnya. Karena jika pemerintah tidak segera membuat rancangan terkait pelaksanaan program ini dengan jelas, maka saat pandemi mulai surut peserta pelatihan akan hanya mengincar dana insentif tanpa menghiraukan pelatihannya.

Persiapan untuk mengubah tujuan program ini harus segera dipersiapkan sedini mungkin agar program ini berjalan dengan baik dan sesuai harapan pemerintah juga rakyatnya. Karena selama pandemi ini digital semakin berkembang pesat bahkan mengubah pasar kerja. Jika memang sementara ini program ditujukan bagi mereka yang terdampak PHK, proses seleksi yang dilakukan oleh pemerintah harus bisa lebih ketat dan jelas karena program ini masih disalahgunakan bagi kalangan-kalangan berada.

Namun, dari pelaksanaan program ini yang sementara ini masih menjadi semi-bansos menjadikan tujuan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat juga tidak terlalu sesuai, karena masih banyaknya kelas pelatihan yang hanya sekedar berupa video, bukan yang benar-benar seperti pelatihan yang membimbing peserta untuk meningkatkan kompetensinya. Terlebih lagi bantuan pemerintah sebesar Rp 1.000.000,00 tidak semua dimanfaatkan karena rata-rata mereka hanya membeli 1-2 pelatihan saja, yang mana itu sangat disayangkan karena mereka hanya membeli pelatihan seharga Rp 200.000 an, hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.7 Infografik Turma



Marta Ilma, salah satu narasumber juga menyatakan bahwa pelatihan yang ia beli seharga Rp 250.000,00 saja dan tersisa bantuan Rp 750.000,00.⁹⁹

⁹⁹ Ilma, wawancara (4 April 2021)

angat disayangkan, program yang memiliki tujuan peningkatan kompetensi karena banyaknya pengangguran di Indonesia yang dikarenakan ketidaksiapan mereka masuk dunia kerja tidak memanfaatkan program ini sebaik mungkin. Kemasslahatan yang sudah disediakan oleh pemerintah tidak termanfaatkan dengan baik, yang mana ini juga termasuk ke dalam kewajiban pemerintah untuk lebih mengetatkan pelaksanaan program ini agar sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional Tahun 2020 yang diolah Indef Institute menyatakan bahwa 77% penerima program ini adalah mereka yang pendapatannya tidak mengalami penurunan dan sisanya adalah mereka yang memang mengalami penurunan pendapatan, maka dari sini tujuan untuk memfokuskan bagi mereka yang terdampak COVID-19 menjadi kurang tercapai karena pengawasan pemerintah yang kurang terhadap seleksi penerimaan peserta. Namun, pemerintah memang saat ini sedang berusaha untuk meningkatkan kualitas program kartu prakerja agar lebih tepat sasaran, adapun hal ini dilakukan dengan pemutusan kepesertaan bagi mereka yang tidak segera membeli program bantuan, menyeleksi ketat bagi penduduk yang sudah menerima program bantuan walaupun penyeleksian ini juga terkadang masih menimbulkan efek yang kurang baik bagi sebagian masyarakat yang lain, karena banyak pendaftar yang terus gagal karena dianggap mendapatkan bantuan sosial baik untuk dirinya ataupun keluarga dekatnya yang faktanya mereka sama sekali tidak mendapatkan program bantuan sosial dalam bentuk apapun. Jika hal-hal di atas masih terus berjalan

dalam kurun waktu yang lama tanpa ada perubahan, akan membuat *mashlahah mursalah* yang ada pada program ini menjadi berkurang. Karena, jika hal ini tidak benar-benar di atasi oleh pemerintah maka akan ada kecemburuan sosial.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan terkait Implementasi pembagian dan pelatihan berbasis Kartu Prakerja perspektif Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 dan *Mashlahah mursalah*, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kartu Prakerja yang dilaksanakan saat ini berjalan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 ditinjau dari pelaksanaan dan cita-cita program ini, hal ini dibuktikan dari banyaknya peminat program ini yang menurut data BPS 2020 sudah 55,6 juta orang yang mendaftar. Program ini juga memberikan dampak positif untuk meningkatkan keterampilannya sebesar 88,9%, namun masih kurang sesuai jika ditinjau dari para penerima program ini, karena penganggur hanya menempati presentase 22,4% sedangkan lainnya masih bekerja dan masih ada penerima program yang mendaftar hanya untuk mengisi waktu luang dan mengikuti kerabat yang mana program ini masih diutamakan bagi pencari kerja dan penerima dampak COVID-19.
2. Menurut tinjauan *mashlahah mursalah* terhadap pelaksanaan Kartu Prakerja ini, program belum berjalan sesuai dengan *mashlahah* menurut Imam Al-Ghazali walau tidak semua syaratnya terpenuhi, karena program ini berjalan sesuai syara', tidak bertentangan dengan

nash yang membahasnya secara umum, kemaslahatan yang hanya sebatas muamalah saja, termasuk program yang dibutuhkan dan memberikan kemudahan masyarakat, berlaku untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan, namun tujuan pembuatan program ini masih berubah-ubah karena masih terdapat rencana untuk pengubahan sistem pelaksanaan program menjadi program pelatihan yang seharusnya, bukan semi bansos seperti sekarang.

B. Saran

Dari kesimpulan yang sudah disebutkan di atas, peneliti memberikan saran agar bisa menjadi bahan evaluasi kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait pelaksanaan Kartu Prakerja :

1. Pengetatan seleksi pelatihan harus bisa dilaksanakan agar tidak sampai salah sasaran penerimaan program ini dan seleksi ini juga lebih diawasi agar masyarakat yang sebenarnya tidak mendapatkan bantuan sosial apapun namun terdata mendapat bantuan. Selain itu, program yang di dasari tujuan peningkatan kompetensi lebih baik difokuskan dengan pelatihan yang lebih berkualitas dan ketatnya pemerintah untuk bisa lolos dalam setiap ujian setelah mengikuti pelatihan agar lebih efektif. Agar sertifikat yang di dapat dari program ini bisa benar-benar menjadi pertimbangan perusahaan jika program ini dijalani dengan serius.

2. Agar kemaslahatan tercipta di lingkungan masyarakat selama pandemi ini, program bantuan sosial secara langsung akan lebih dibutuhkan oleh mayoritas masyarakat dibanding dengan program semi-bansos yang mana membutuhkan prosedur yang panjang untuk mendapat bantuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggitafani, Rachma Fadila. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No. 1/PJOK.07/ 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan.”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/25192/>
- Anonim, “Apa Itu Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER)?,” *Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat*, 3 Oktober 2020, diakses 13 Februari 2021, [https://disnakertrans.ntbprov.go.id/apa-itu-sistem-informasi-ketenagakerjaan-sisnaker/#:~:text=Sistem%20Informasi%20Ketenagakerjaan%20\(Sisnaker\)%20adalah,mengarah%20pada%20otomasi%20dan%20digitalisasi.&text=Ini%20lantaran%20core%20bisnis%20Kemnaker,tenaga%20kerja%20dan%20stakeholder%20terkait.](https://disnakertrans.ntbprov.go.id/apa-itu-sistem-informasi-ketenagakerjaan-sisnaker/#:~:text=Sistem%20Informasi%20Ketenagakerjaan%20(Sisnaker)%20adalah,mengarah%20pada%20otomasi%20dan%20digitalisasi.&text=Ini%20lantaran%20core%20bisnis%20Kemnaker,tenaga%20kerja%20dan%20stakeholder%20terkait.)
- Anonim, “BRIncubator 2021, Ajang UMKM Kuliner Menuju Pasar Global,” *CNBC Indonesia*, 20 April 2021, diakses 29 April 2021
<https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20210420114405-25-239199/brincubator-2021-ajang-umkm-kuliner-menuju-pasar-global>
- Asiah, Nur. “Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali,” *Diktum*, No.1(2020): 118-128 <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>

Badan Pusat Statistik, “(Revisi per 23/11/2020) Agustus 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen”, *Badan Pusat Statistik*, 5 November 2020, diakses pada 5 Februari 2021, [https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html#:~:text=Tingkat%20pengangguran%20terbuka%20\(TPT\)%20Agustus,juta%20orang%20dari%20Agustus%202019.](https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html#:~:text=Tingkat%20pengangguran%20terbuka%20(TPT)%20Agustus,juta%20orang%20dari%20Agustus%202019.)

Bangsa, Ryan Puspa. “Jokowi: Kartu Prakerja Terbukti Tingkatkan Keterampilan,” *Gatra.com*, 17 Maret 2021, diakses 22 April 2021, <https://www.gatra.com/detail/news/506469/ekonomi/jokowi-kartu-prakerja-terbukti-tingkatkan-keterampilan#:~:text=Jakarta%2C%20Gatra.com%2D%20Presiden,program%20Kartu%20Prakerja%20meningkatkan%20keterampilan.&text=Peserta%20program%20Kartu%20Prakerja%20dipersilakan,diminati%20untuk%20dapat%20meningkatkan%20kemampuan>

CNN Indonesia, “Survei PMO: 387.234 Alumni Kartu Prakerja Jadi ‘Pengusaha’,” *CNN Indonesia*, 8 April 2021, diakses 21 April 2021, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210408171810-532-627597/survei-pmo-387234-alumni-kartu-prakerja-jadi-pengusaha>

- Consuello, Yoshua. "Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid-19", *Adalah* no. 1(2020): 93-100
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15479>
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Djazuli, H.A dan Nurol Aen. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Djazuli, H.A. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Fazlurrahman, Haidar. "Jual Beli Uang dengan Nomor Seri Cantik (Tinjauan Fiqh Muamalah dan KUH Perdata)", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, <http://etheses.uin-malang.ac.id/17096/>
- Franita, Riska. "Analisis Pengangguran di Indonesia," *Nusantara*, no. 1(2016): 88-93
<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/97/97>
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan*, No. 2(2018): 115-136
<https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49/35>
- Hukama, Ardika Fateh. "Persepsi Masyarakat Pedesaan Terhadap Pendidikan Tinggi (Studi Analisis Teori George Herbert Mead)," *JPIPS*, No.1 (2017): 4
<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jpips>

- Imam Royani Hamzah, Siti Khusnia, “Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Sostech*, no. 1(2021): 2
<http://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/3/5>
- Intan Support Kemnaker, “Apa Manfaat Kartu Prakerja,” *Sistem Informasi Ketenagakerjaan*, 16 Maret 2021, diakses 22 April 2021,
<https://bantuan.kemnaker.go.id/support/solutions/articles/43000568759-apa-manfaat-kartu-prakerja->
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, diakses 20 Januari 2021,
<https://pelatihan.kemnaker.go.id/prakerja/about?acceptPreWorkCard=1>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, diakses 15 November 2020 <https://www.prakerja.go.id/tentangkami>
- Kusuma, Hendra. “Awal Mulai Ide Pengangguran ‘Digaj’ Rp 500 Ribu/Bulan,” *detikFinance*, 25 September 2019, diakses 21 April 2021,
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4721306/awal-mula-ide-pengangguran-digaji-rp-500-ribubulan>
- Mahmudah, Intan Laitlatul. “Implementasi Perlindungan Hukum Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI Tulungagung,” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/view/divisions/JHBS/2020.html>.
- Muchlas, Makmuri. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020.

<http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

Munir, Misbahul dan A. Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani Doktrin Reformasi Ekonomi dalam Al-Qur'an*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014.

Nisa, Ahda Suluki. “Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/RJMBI/article/view/5762>

Ochtorina, Dyah dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Padil, Moh. dan M. Fahim Tharaba. *Ushul Fiqh*. Malang: Madani, 2017.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Permenko Perekonomian Nomor 11 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan

Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

Predianto, Tomi dan Khoirurrosyidin, “Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19,” *Gorontalo*, no. 2(2020): 115-127 [10.32662/gigops.v3i2.1175](https://doi.org/10.32662/gigops.v3i2.1175)

Samsuni. “Manajemen Sumber Daya Manusia,” *Al-Falah*, No. 1 (2017): 113-124
<http://ejurnal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/alfalahjikk/article/view/19/88>

Sarif, Akbar dan Ridzwan Ahmad. “Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali,” *Tsaqafah*, No. 2(2017): 353-368
<http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183>

Situmorang, Anggun P. “Realisasi Anggaran Kartu Prakerja di 2021 Capai Rp 4,26 Triliun hingga 13 Maret,” *Liputan 6*, 18 Maret 2021, diakses 22 April 2021,
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4509497/realisasi-anggaran-kartu-prakerja-di-2021-capai-rp-426-triliun-hingga-13-maret#>

Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Suteki dan Galang Taufi. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Zikrul, 2004.

- Theodora, Agnes. “Kartu Prakerja Akan Kembali ke Fungsi Awal,” *Kompas*, 29 Maret 2021, diakses 23 April 2021
https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/03/29/kartu-prakerja-akan-kembali-ke-fungsi-awal/?status=sukses_login&status_login=login#
- Tias, Indah Ayuning. “Analisis Peran Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dalam Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Masyarakat Desa Purworejo Kabupaten Pesawaran)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
<http://repository.radenintan.ac.id/2415/>
- Tim Penyusun Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang: UIN Press, 2015.
- Tjiptoherijanto, Priyono. *Untaian Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1989.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Wijayanti, Rani Ika dan Ana Humardhiana. “Optimalisasi Program Kartu Prakerja dengan Pelatihan Branding Stratedy,” *dimasejati*, no. 1(2020): 109-122
<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/dimasejati/article/view/6645>
- Yasid bin Abdul Qadir Jawas, “Tidak boleh membahayakan orang lain,” *al-manhaj*, 13 Oktober 2019, diakses pada 31 Juli 2021, <https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html>.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. *Mushaf Lafziyyah Al-Huda*. Jakarta:

Al-Huda, 2014.

Zahra, Zakiatul. "Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Program Kartu Prakerja",

Academia.edu, 2020, diakses 1 April 2021,

[https://www.academia.edu/44091462/ANALISIS_KEBIJAKAN_PEMERINTAH](https://www.academia.edu/44091462/ANALISIS_KEBIJAKAN_PEMERINTAH_TERKAIT_PROGRAM_KARTU_PRAKERJA)

[AH_TERKAIT_PROGRAM_KARTU_PRAKERJA](https://www.academia.edu/44091462/ANALISIS_KEBIJAKAN_PEMERINTAH_TERKAIT_PROGRAM_KARTU_PRAKERJA)

Zein, Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*. Jogjakarta: Pustaka Pesantren, 2016.

LAMPIRAN

Ayang

Selamat sore ka.. perkenalkan, saya Salsabila Alia mahasiswi Universitas Islam Negeri Malang. Saat ini saya sedang meneliti untuk bahan skripsi saya terkait kartu prakerja. Saya baru saja melihat salah satu postingan kakak. Jika saya tidak mengganggu, boleh saya sedikit bertanya kepada kakak terkait program kartu prakerja ini kak? Terimakasih kak 😊

Anda kini bisa saling mengirim pesan dan menelepon serta melihat info seperti Status Aktif dan kapan pesan dibaca.

Silahkan

Senang kalo bisa membantu org

Terimakasih banyak kak sebelumnya 😊, saya alia kak, kalau kakak dengan siapa ka? 😊

Ok alia. Aku siti.

Baik kak siti, untuk kak siti sudah daftar kartu prakerja dan sudah sampai mendapatkan insentif kah kak?

Resty_yaa

gak tau juga kak kenapa gak lolos"

padahal butuh banget di kondisi yg saat ini

kalau boleh tau, untuk sekarang suami dan kakak sedang bekerja atau tidak kak? dan dampak yang dirasakan kakak selama pandemi COVID-19 ini gimana sih kak di keluarga kaka

Tuesday 9:42 PM

kalau aku kemarin" jualan online kak tp skrang udah engga karna modalnya udah kemakan biaya sehani", sekarang aku cuma bisa nunggu kalau ada yg mau jasa antar barang "kurir", suami juga udah 2 minggu berhenti kerja padahal kemarin baru masuk sekita 1 bulan bekerja tp di stop lg.

berdampak banget kak semenjak covid ini, nyari kerjaan susah, jualan juga kadang kemakan modal, kadang juga jualan gak ada untungnya untuk ada yg beli aja udah bersyukur,

Kirim pesan...

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kuning St. Jakarta 12550 Telepon 8255733
 Laman: www.kemnaker.go.id

PEMBERITAHUAN TERTULIS
 No. U 219 /HM.09/II/2021

Berdasarkan permohonan informasi pada tanggal 26 bulan Februari tahun 2021 dengan nomor pendaftaran Reg. 7/PIU/2021, kami menyampaikan kepada Saudara:

Nama : Salsabila Alia Rizki
 Alamat : Jl. Suwari Selatan I A RT.002 RW.008 Kec. Sukun Kota. Malang Jawa Timur
 No. KTP : 387304520980003
 No. HP/Surel : 082147439134 / -

Pemberitahuan sebagai berikut:
 Informasi yang dapat diberikan: "Jawaban Tertulis terkait Implementasi Pembagian dan Pelatihan Berbasis Kartu Prakerja di Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER) Poropelot Hukum Islam". Jawaban dapat dilihat pada halaman lampiran.

No.	Hal-hal Terkini Informasi Publik	Keterangan
1	Penggunaan informasi publik	Kementerian Ketenagakerjaan
2	Bentuk fisik yang tersedia	Salinan Digital
3	Biaya yang dibutuhkan	Rp. 0,-
4	Waktu penyediaan	10 Hari Kerja

Jakarta, 15 Maret 2021

Pl. Kepala Biro
 Hukum dan Litigasi
 Chandra Gunawan, S.E., M.M.
 NIP. 196303011990111001

Daftar Pertanyaan dan Jawaban terkait penyelenggaraan Program Kartu Prakerja di Lingkungan Kemnaker

- Apakah Kementerian Ketenagakerjaan memiliki keterkaitan lain dengan pelatihan Kartu Prakerja selain menjadi salah satu platform pelaksanaan Kartu Prakerja?
 Dalam Perpres 30/2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 78/2020 tentang Komite Cipta Kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan program Kartu Prakerja, Menteri Ketenagakerjaan merupakan salah satu anggota dari Komite Cipta Kerja. Kemnaker memiliki sebuah ekosistem ketenagakerjaan berbasis digital bernama Sisnaker. Selain menyelenggarakan Program Kartu Prakerja, Sisnaker berperan sebagai Platform Digital Program Kartu Prakerja.
- Apakah Kementerian Ketenagakerjaan mengetahui terkait kriteria peserta yang diterima pada pelatihan Kartu Prakerja?
 Berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kompetensi Kartu Prakerja dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kompetensi Kartu Prakerja, Program Kartu Prakerja yang merupakan Amanah Dari Pelaksanaan Perpres Nomor 70 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Cipta Kerja, bertujuan untuk

Mas hamzah

Assalamualaikum, selamat sore mas. Mohon maaf mengganggu waktunya, saya Alia, dari HES 17. Saya dapet nomer mas nya dari mbak Rani. Saya dapet informasi kalau mas ikut program kartu prakerja ya mas? Kalau mungkin mas sedang tidak sibuk, saya boleh tanya tanya tentang program ini ke mas kah? Soalnya kebetulan skripsi saya bahas tentang kartu prakerja. Terimakasih banyak mas 😊

Walaikumsalam 16.49

Iya 16.49

Baik mas, ini benar ya dengan mas hamzah? Mas hamzah daftar di pelatihan kartu prakerja di gelombang berapa mas? Dan sudah sampai ke tahap penerimaan dana insentif kah mas? 16.54

Iya saya hamzah 17.02

Gelombang 6 kayaknya 17.02

Sampai menerima dana insentif 17.02

Panggilan suara tak terjawab pukul 17.04

Buat mas hamzah sendiri yang buat mas ikut mendaftarkan di program kerja ini apa mas? 17.09

Iya saya daftar sendiri 17.09

Apasih mas yang buat mas hamzah tertarik buat daftar di kartu prakerja mas? 17.10

Ketik pesan

Mbak Ilma

dana pelatitah terdapat... Baca selengkapnya 10.20

okee nanti yaaa 12.47

Syap mbaa 😊 12.59

- aku pake tokopedia
- soalnya pas banget dengan keadaanku sekarang yang masih pengangguran dan banyak benefitnya juga kayak ada pelatihan dan pastinya ada intensif
- masih belum rejeki ku aja.. dari gelombang 1,7,9,10,12,13
- sendang mencari kerja
- untuk menopang kebutuhan hidup, doain yaa lancar dan berkembang bisnisku aamiin hehehe
- 6.250.000, masiih
- sesuai
- 1 setengah jam kayakee
- gak ada tanya jawab, kalau kuisnya ada, kalau nilai kecil harus ngulang lagi sampek nilainya bagus
- efektif
- untuk yang gaptek si kurang efektif ya.. solusinya kalau dia ingin mendaftar mungkin dia bisa minta bantuan ke orang sekitar yang paham IT
- tidak ada keterlambatan
- kalau aku milih prakerja soalnya banyak benefitnya gitulo, gak cuma intensif aja tapi kita juga dapet ilmu dari situ. tapi kan kebutuhan dan keadaan orang beda2 mungkin banyak orang juga lebih memilih bantuan langsung tanpa syarat karena lebih meringankan mereka.

kuketikk ya aliya hehe 22.44

Ketik pesan

Panduan Wawancara

Pertanyaan untuk pendaftar Kartu Prakerja yang belum lolos

1. Apakah motivasi mengikuti program Kartu Prakerja?
2. Darimanakah asal anda?
3. Pada gelombang berapa saja anda mengikuti pendaftaran pada program ini?
4. Apakah tes yang diujikan tergolong sulit? Apakah bisa dilakukan oleh masyarakat yang hanya lulusan SD?
5. Apakah perlu ada persiapan khusus untuk mengikuti tes?
6. Apakah anda tergolong ke dalam masyarakat yang terdampak COVID-19?
7. Apakah proses pendaftaran yang dilalui untuk mendaftarkan Kartu Prakerja cukup sulit?
8. Bidang apa yang nantinya akan anda ambil jika lolos di program ini?

Pertanyaan untuk pendaftar Kartu Prakerja yang lolos

1. Apakah motivasi mengikuti program Kartu Prakerja?
2. Dimana anda melakukan pembelian pelatihan Kartu Prakerja?
3. Apakah sebelumnya pernah tidak lolos mendaftar program ini? Pada gelombang berapa saja?
4. Apakah anda tergolong orang yang mencari kerja/terkena PHK/ingin membuka usaha/pekerja yang dikurangi jam kerjanya karena dampak COVID-19 atau bukan dari salah satunya?
5. Jika program ini dimanfaatkan untuk membuka usaha, apakah usaha yang didirikan ini hanya untuk sampingan atau memenuhi kebutuhan hidup?
6. Bidang pelatihan apa yang anda ikuti?
7. Berapa kisaran harga pelatihan yang anda ikuti?
8. Apa masih terdapat sisa uang bantuan pelatihan pada akun anda?
9. Berapa lama durasi waktu pelatihan yang anda ikuti?
10. Apakah terdapat sesi tanya jawab dan kuis pada pelatihan anda? Apakah terdapat konsekuensi jika nilai kuis kurang memuaskan?
11. Apakah Kartu Prakerja bisa dilakukan oleh masyarakat yang hanya lulusan SD?
12. Apakah terdapat keterlambatan pemberian dana insentif?
13. Manakah yang akan anda pilih jika pemerintah memberikan bantuan semacam Kartu Prakerja atau bantuan langsung, terutama disaat pandemi pada saat ini?

Pertanyaan untuk Kemnaker

1. Apakah Kemnaker memiliki keterkaitan lain dengan pelatihan Kartu Prakerja selain menjadi salah satu platform pelaksanaan Kartu Prakerja?
2. Apakah Kemnaker mengetahui terkait kriteria peserta yang diterima pada pelatihan Kartu Prakerja?
3. Apakah Kemnaker mengetahui proses pemberian uang insentif pada peserta? Jika mengetahui bagaimana prosesnya?
4. Apakah semua peserta yang mengikuti pelatihan ini akan mendapatkan insentif?
5. Adakah syarat lain yang harus diberikan kepada peserta untuk bisa mendapatkan dana insentif selain wajib mengikuti pelatihan?
6. Apakah dana insentif tersebut diberikan langsung dari pusat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada peserta atau dari pusat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disalurkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui SISNAKER terlebih dahulu?
7. Apakah terdapat jaminan lain kepada peserta, selain dana insentif yang diberikan? (Seperti jaminan mendapatkan pekerjaannya/ yang lain).
8. Bagaimana jika dana insentif ada yang terhambat sehingga tidak diberikan sesuai dengan perjanjian yakni 4 bulan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Salsabilla Alia Rizki
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 12 September 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Tirtasari Raya No.18, Kebonsari, Sukun,
Malang, 65149.
Alamat di Malang : Jl. Tirtasari Raya No.18, Kebonsari, Sukun,
Malang, 65149.
Telepon : 082143476134
E-mail : salsabillaalia12@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tempat	Keterangan
1.	RA/TK	TK Plus Al-Kautsar	Malang	2003-2005
2.	SD	SD Plus Al-Kautsar	Malang	2005-2011
3.	SMP	SMPN 6 Malang	Malang	2011-2014
4.	SMA	Man 2 Kota Malang	Malang	2014-2017
5.	S1	UIN Maliki Malang	Malang	2017-2020